

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM
OMAH PANEL TINGKAT MILIK SEJAHTERA
(OPTIMIS) DI KAMPUNG BLANGKON SURAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun oleh:

**AMILA ZULFAA FARAHDIBA SANTI
NIM 21102030013**

Dosen Pembimbing:

**Prof Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S. Sos. M.Si.
NIP 19810428 200312 1 003**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1688/Un.02/DD/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM OMAH PANEL TINGKAT MILIK SEJAHTERA (OPTIMIS) DI KAMPUNG BLANGKON SURAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMILA ZULFAA FARAHDIBA SANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21102030013
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a95436d57054

Ketua Sidang

Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a953d18e99e

Penguji I

Beti Nur Hayati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a95436cfe88

Penguji II

Suharto, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a95458918ef6

Yogyakarta, 04 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amila Zulfaa Farahdiba Santi
NIM : 21102030013
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera (OPTIMIS) Di Kampung Blangkon Surakarta** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang menyatakan,



Amila Zulfaa Farahdiba Santi
NIM. 21102030013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://dakwah.uin-suka.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amila Zulfaa Farahdiba Santi
NIM : 21102030013
Judul Skripsi : Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera (OPTIMIS) Di Kampung Blangkon Surakarta

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- ☐ Bebas dari unsur plagiarisme.
- ☐ Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- ☐ Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Prof. Dr. Hajjah Halma Indra Jaya
NIP. 198108382003121003

Mengetahui:
Ketua Program Studi

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, pertolongan serta hidayah dari Allah SWT, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Ayahanda Widiyanto Suhada dan Ibunda Lilik Nurul Afifah, serta kakak tercinta Maulida Devika Santi

yang selalu menjadi keluarga terbaik bagi penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, serta kepercayaan yang selalu diberikan sehingga penulis mampu terus melangkah, bertahan, dan menyelesaikan karya ini.

Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada **seluruh kelompok marginal yang sedang berjuang dalam hidupnya**. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, maupun kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

(QS. Al-Ikhlās: 1-4)

“Hanya dengan mengingat Allah hati terasa tenang.”

(QS. Ar-Ra’d: 28)

“You’ll get there, but right now you’re here.”

(Amila Zulfā F.S.)

“Do it scared, the fear doesn’t have to disappear for you to move forward.”

(Amila Zulfā F.S.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Terselesaikannya skripsi ini sebagai anugerah atas rahmat dan karunia Allah SWT yang senantiasa menyertai setiap proses penyusunannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis sadar bahwasanya keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, maupun perhatian berbagai pihak. Sehingga, penulis memberikan sampai rasa hormat maupun terima kasih yang sebesar-besarnya pada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas kesabaran, waktu, dan arahan berharga dalam membimbing penulisan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan limpahan rahmat Allah SWT.
4. Ibu Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si. selaku Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam. Terima kasih atas segala arahan dan fasilitasi akademik selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam atas bekal ilmu dan pengetahuan yang tidak habis untuk digali, semoga menjadi amal baik.
6. Seluruh staff Tata Usaha Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah memberikan kemudahan administrative.

7. Para informan yang telah berkenan memberikan waktu, informasi, dan pelajaran hidup kepada penulis sekaligus sebagai informan dalam proses penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta. Bapak Widiyanto Suhada, Ibuk Lilik Nurul Afifah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, yang tidak pernah terputus pada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala ketulusan, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu diberikan
9. Kakak tercinta, Maulida Devika Santi, yang selalu memberi dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi bagi penulis dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini.
10. Bima, Hasyim, Kofifah, Rizma, Nayif, Rifda dan Nadiyya selaku teman dan keluarga selama Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM) di Kandang Maggot Jogja. Terima kasih telah mengukir momen yang berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis sejak semester lima hingga saat ini, serta menjadi teman yang senantiasa membantu maupun menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Community Development (COMDEV) 21, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai kenangan berharga selama masa perkuliahan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesuksesan dan terus mampu menginspirasi serta membawa perubahan yang baik bagi sekitar.
12. Shafa, Mayang, Eni, Yasmin, Ajeng, Ama, Manda, dan Fahmi selaku teman-teman KKN yang telah Bersama-sama mencari pengalaman dan berbagi cerita

selama berada di berada di Kota Surakarta. Terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis.

13. Seluruh keluarga besar yang mendoakan dan memeberi dukungan kepada penulis.
14. Kepada seluruh pihak maupun kawan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis memberikan ucapan terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya segala bentuk bantuan tersebut tidak dapat terbalaskan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis memohon pada Allah SWT agar segala kebaikan maupun bantuan yang telah diberikan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan terbaik dari-Nya.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih mempunyai berbagai kekurangan maupun belum sepenuhnya sempurna. Sehingga, penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang membangun dari para pembaca sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan karya ini.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Amila Zulfaa Farahdiba Santi
NIM. 21102030013

DAFTAR ISI

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM OMAH PANEL TINGKAT MILIK SEJAHTERA (OPTIMIS) DI KAMPUNG BLANGKON SURAKARTA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Landasan Teori	20
1. Strategi Pengentasan Kemiskinan	20
2. Hasil (output) bagi Kesejahteraan Masyarakat.....	35
3. Analisis SWOT: Menjelaskan Faktor Pendukung dan Penghambat Program	42
G. Metodologi Penelitian.....	43
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3. Teknik Pengumpulan Data	44
4. Subjek dan Fokus Penelitian.....	47
5. Penentuan Informan.....	48
6. Validitas Data	49
7. Teknik Analisis Data	50
H. Sistematika Pembahasan.....	52

BAB II GAMBARAN KAMPUNG BLANGKON	54
A. Letak dan Kondisi Geografis Kampung Blangkon	54
B. Gambaran Kemiskinan di Kampung Blangkon	57
C. Kondisi Pekerjaan dan Pendidikan Masyarakat Kampung Blangkon.....	63
D. Gambaran Program OPTIMIS	69
BAB III PEMBAHASAN	73
A. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program OPTIMIS di Kampung Blangkon	73
B. Hasil Program OPTIMIS dalam Pengentasan Kemiskinan	92
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program OPTIMIS	106
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Miiskin Prioritas 1 dan 2 menurut Data dari Dinas Sosial Kota Surakarta pada Tahun 2023-2024	59
Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut pekerjaan dan jenis kelamin di Kelurahan Serengan tahun 2023-2024	63
Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin di Kelurahan Serengan, 2023-2024	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kelurahan Serengan	55
Gambar 2.2 Kawasan Makam Tinalan Kampung di Blangkon Tinalan (Area Rumah OPTIMIS)	56
Gambar 2.3 Kondisi Lingkungan Makam Tinalan yang Dibangun Rumah Warga Diatasnya	62
Gambar 3.1 Penyerahan Sertifikat Tanah kepada Warga Penerima Program OPTIMIS oleh PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana	78
Gambar 3.2 Penyerahan Sertifikat Tanah	78
Gambar 3.3 Kondisi Sebelum Program OPTIMIS	81
Gambar 3.4 Kondisi Setelah Program OPTIMIS.....	81
Gambar 3.5 Rapat Kordinasi Warg.....	84
Gambar 3.6 Proses Pembangunan Rumah OPTIMIS	91
Gambar 3.7 Pengrajin Blangkon.....	100
Gambar 3.8 Hasil Akhir Program OPTIMIS	101
Gambar 3.9 Pendampingan dan Koordinasi Tokoh Masyarakat dalam Program OPTIMIS	111



ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang sulit diatasi, meskipun berbagai program pengentasan telah diupayakan oleh pemerintah, baik di tingkatan pusat maupun daerah, namun persoalan kemiskinan masih tetap menjadi persoalan di Indonesia. Adapun program pengentasan kemiskinan yang menarik untuk diteliti yaitu Program OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera) yang dilaksanakan di Kampung Wisata Blangkon, Surakarta. Program ini dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program ini dipilih karena program pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan kegiatan utama berupa penataan permukiman kumuh sekaligus pembangunan rumah layak huni. Keunikan program ini terletak pada pendekatan berbasis kolaborasi lokal dan partisipasi masyarakat. Sebagaimana latar belakang tersebut tujuannya dari penelitian ini guna mengkaji lebih detail terkait strategi yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan melalui Program OPTIMIS, sekaligus melihat hasil program terhadap kesejahteraan masyarakat di Kampung Blangkon. Penelitian dilaksanakan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Temuan ini mengungkapkan bahwasanya strategi pengentasan kemiskinan dalam Program OPTIMIS dilakukan secara bertahap dan melibatkan sinergi antarlembaga. Program OPTIMIS dinilai mampu menambah tingkatan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui penyediaan hunian yang lebih layak maupun tertata, memberikan kepastian hukum melalui pensertifikatan tanah, serta membuka peluang baru bagi penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, perumahan layak huni, pemberdayaan masyarakat, OPTIMIS, Kampung Blangkon.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu ataupun kelompok dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di antaranya kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kesehatan, akibat keterbatasan sumber daya ekonomi.¹ Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwasanya per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang, atau 9,03% dari total penduduk.² Angka tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan secara nasional, sedangkan karakteristik kemiskinan di setiap wilayah memiliki perbedaan, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kemiskinan di perkotaan bersifat multidimensional. Berbeda dengan kemiskinan di perdesaan yang umumnya terkait dengan keterbatasan akses terhadap lahan dan sektor pertanian, kemiskinan di perkotaan dipengaruhi oleh rendahnya kesempatan kerja formal, biaya hidup tinggi, pendapatan yang kecil, ketimpangan dalam distribusi sumber daya.³ Selain itu kemiskinan perkotaan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan

¹ Sisilia Maria Parinusa and Danny E Waimbo, "Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2019," *Lensa Ekonomi* 11, no. 01 (November 30, 2020): 96, <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.84>.

² Ahmad Rijal Lutfian Wijanarko, Andarita Rolalisasi, and Ibrahim Tohar, "Tipologi Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Indonesia Berdasarkan Penanganan," *Jurnal Arsitektur Kolaborasi* 3, no. 1 (April 1, 2023): 10–14, <https://doi.org/10.54325/kolaborasi.v3i1.37>.

³ Asty Raisha Agma, "Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2025): 25–31, <https://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jisip/article/view/39/34>.

penduduk yang pesat akibat urbanisasi yang memicu munculnya pemukiman kumuh, hunian tidak layak, kemacetan, serta naiknya angka pengangguran dan kriminalitas.

Salah satu manifestasi utama kemiskinan adalah munculnya permukiman kumuh dan hunian tidak layak, yang ditandai oleh ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, serta rendahnya mutu fasilitas prasarana. Kondisi ini seringkali terjadi di lantai kota yang menjadi pusat peluang ekonomi namun tidak mampu menyuplai hunian yang layak bagi penduduk berpendapatan rendah. Penelitian di beberapa kota di Indonesia juga menegaskan hubungan antara kemiskinan dengan pemukiman kumuh sebagai konsekuensi langsung dari kapasitas penduduk yang tidak mampu membeli tanah atau rumah layak.⁴⁵

Surakarta, menjadi satu dari sekian kota besar di Jawa Tengah, menghadapi permasalahan kemiskinan yang masih memerlukan perhatian, terutama terkait penyediaan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwasanya per Maret 2024, presentase penduduk miskin di Kota Surakarta adalah 8,31 persen. Kemiskinan Surakarta dipahami sebagai kombinasi antara rendahnya pendapatan per kapita, keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, serta hambatan struktural pada perumahan dan kesempatan kerja

⁴ Wilko Rahmad Zulkarnaini, Elfindri Elfindri, and Delfia Tanjung Sari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi," *Jurnal Planologi* 16, no. 2 (October 9, 2019): 169, <https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047>.

⁵ Agistya Risna Sari Sari and Mohammad Agung Ridlo, "Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan," *Jurnal Kajian Ruang* 1, no. 2 (January 20, 2022): 160, <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>.

⁶ Lutfian Wijanarko, Rolalisasi, and Tohar, "Tipologi Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Indonesia Berdasarkan Penanganan."

yang berdampak pada kualitas hidup warga berpendapatan rendah.⁷⁸ Kondisi tersebut juga ditemukan di berbagai kota di Indonesia dengan karakteristik yang beragam yang dijumpai pada kawasan bantaran sungai, sekitar jalur rel kereta api, maupun kawasan yang berdiri di atas tanah negara dengan keterbatasan kepastian hak atas lahan. Pada kawasan bantaran sungai, misalnya, permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni ditemukan di sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong di Kota Yogyakarta, serta di bantaran Sungai Ciliwung di DKI Jakarta dan kawasan tepian sungai di Kota Banjarmasin.⁹¹⁰ Sementara itu, permukiman tidak layak juga ditemukan di sekitar jalur rel kereta api, seperti di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, kawasan Dupak Magersari di Surabaya, serta wilayah Gondokusuman di Yogyakarta.¹¹¹² Selain itu, hunian tidak layak juga dapat ditemukan pada kawasan yang berada di atas tanah negara, terutama di kota-kota yang menghadapi tekanan urbanisasi dan keterbatasan lahan, seperti Jakarta,

⁷ Bagus Eka Saputra, "Pengaruh Kemahalan Konstruksi, Keparahan Kemiskinan, Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap PDRB Konstruksi Di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 21, no. 2 (April 4, 2024): 193–204, <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v21i2.1067>.

⁸ Jihan Sabilillah and Mulyo Hendarto Robertus, "Pengaruh Urbanisasi, Modal Manusia, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Perkotaan Di Enam Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021," *Diponegoro Journal of Economics* 13, no. 3 (September 30, 2024): 43–53, <https://doi.org/10.14710/djoe.45373>.

⁹ Agus Salim, Siti Nursanti Irriani, and Yunita Rahmi Hapsari, "Implementasi Pendekatan Symbio-City Pada Pembangunan Inklusif: Studi Kasus Slums Upgrading Di Kota Yogyakarta," *Bappenas Working Papers* 5, no. 2 (July 31, 2022): 241–69, <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.114>.

¹⁰ Nur Aini Fitrianti and Nurul Laili Fadhilah, "Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung Di Provinsi Jakarta," *Lentera Hukum* 5, no. 2 (July 31, 2018): 277, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.6788>.

¹¹ Nisrina Dhiya Rosyada, Ana Hardiana, and Paramita Rahayu, "Faktor Prioritas Dalam Pola Penanganan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai (Studi Kasus: Kali Pepe, Kota Surakarta)," *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 16, no. 1 (January 28, 2021): 45, <https://doi.org/10.20961/region.v16i1.24904>.

¹² Imas Widiyanti, Ahmad Baily, and Shibghotullah Mujadidi, "Implementasi Program KOTAKU Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di Kricak Yogyakarta," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 1 (July 28, 2021): 37–54, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i1.7968>.

Medan, Surabaya, dan Bandung.¹³ Keberadaan hunian tidak layak pada lokasi-lokasi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perumahan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan, sosial ekonomi masyarakat, serta karakteristik dan status lahan.

Salah satu contoh fenomena tersebut terdapat di Kampung Blangkon, Kota Surakarta, yang memiliki permasalahan terkait kondisi hunian dan lingkungan kawasan. Kampung ini dikenal sebagai sentra kerajinan blangkon, namun sebagian besar warganya hidup dalam kondisi sosial-ekonomi yang sulit. Mereka sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin blangkon, namun pendapatan dari hasil kerajinan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Hal ini menjadikan impian mereka untuk memiliki rumah yang layak sangat sulit tercapai.

Sebanyak 33 kepala keluarga hidup di Kawasan kumuh selama bertahun-tahun. Mereka terpaksa mendirikan bangunan liar di atas lahan bekas pemakaman umum milik negara (Makam Tinalan) yang tidak memiliki status kepemilikan yang jelas karena keterbatasan biaya. Tanpa kepemilikan tanah yang sah, warga tidak dapat mengakses sumber daya ekonomi, seperti pinjaman perbankan, dan rentan terhadap ancaman penggusuran.¹⁴ Kondisi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Perumahan yang layak dan memiliki kepastian bermukim dapat menjadi salah satu pintu masuk strategis dalam pengentasan kemiskinan. Selama ini,

¹³ Lani Anggraeni Sihombing and Citra Fadhilah Utami, "Hirarki Dan Distribusi Kota: Penyebaran, Dan Kepadatan Penduduk Serta Implikasinya Terhadap Infrastruktur," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 5, no. 2 (July 11, 2023): 218–29, <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.159>.

¹⁴ E Sugiarto, "Kewirausahaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi," 2021.

kemiskinan lebih sering dilihat melalui indikator pendapatan, pekerjaan, atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, padahal kondisi hunian juga mencerminkan dan memengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Hunian yang layak menyediakan lingkungan yang sehat dan aman serta mendukung kemampuan rumah tangga untuk bekerja, memperoleh pendidikan, dan mengakses layanan dasar. Oleh karena itu, perumahan dapat ditempatkan sebagai salah satu dimensi kemiskinan yang bersifat multidimensi, Bersama dengan kesehatan, sanitasi, air bersih, dan akses terhadap layanan dasar lainnya.¹⁵¹⁶¹⁷

Hunian tidak layak dan tidak memiliki legalitas juga tidak semata-mata merupakan persoalan fisik bangunan, tetapi dapat menunjukkan keterbatasan akses rumah tangga terhadap sumber daya dasar, terutama lahan, tempat tinggal yang aman, dan layanan publik. Keterbatasan pendapatan dan akses terhadap lahan yang terjangkau dapat mendorong rumah tangga berpendapatan rendah untuk menempati hunian dengan kondisi fisik yang buruk, lingkungan yang tidak memadai, atau lahan yang tidak memiliki kepastian hak.¹⁸¹⁹ Kondisi tersebut dapat memperkuat

¹⁵ Nuarida Nuarida, “Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat),” *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* 2, no. 2 (December 5, 2021): 111–19, <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.55>.

¹⁶ Ummi Khuzaimah, Yayuk Farida Baliwati, and Ikeu Tanziha, “Peranan Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penanganan Gizi Kurang Di Provinsi Jawa Barat (The Role Of Pillar Sustainable Development Goals Relate to Tackling Undernutrition in West Java Province),” *Amerta Nutrition* 5, no. 3 (September 1, 2021): 196, <https://doi.org/10.20473/amnt.v5i3.2021.196-210>.

¹⁷ Firdha Ayu Atika and Ikaputra Ikaputra, “Permukiman Kumuh Ditinjau Dari Kontinum Formal Dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara),” *Media Komunikasi Geografi* 24, no. 2 (December 19, 2023): 168–88, <https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.65945>.

¹⁸ Ni Putu Cahya Agung Tika Meidiana and A.A.I.N. Marhaeni, “Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur, Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin,” *Buletin Studi Ekonomi*, July 30, 2019, 54, <https://doi.org/10.24843/BSE.2019.v24.i01.p04>.

¹⁹ Brilliant Aditya Prawira Arafat and Vicko Taniady, “Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Terhadap Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Di Perkotaan Indonesia: Studi Perbandingan

kerentanan rumah tangga karena ketidakpastian bermukim dapat membatasi keamanan tempat tinggal dan akses terhadap layanan, sementara kondisi fisik hunian yang buruk dapat meningkatkan risiko kesehatan dan beban pengeluaran. Dengan demikian, hunian tidak layak dan ketidakpastian legalitas dapat dipandang sebagai bagian dari kemiskinan sekaligus faktor yang berpotensi mempertahankan kondisi kemiskinan.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif lingkaran kemiskinan atau kerugian kumulatif, ketika kondisi hunian yang buruk dan keterbatasan ekonomi saling memperkuat. Rumah tangga berpendapatan rendah memiliki keterbatasan dalam memperoleh hunian yang layak, pada saat yang sama, hunian yang tidak layak dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan biaya yang harus ditanggung rumah tangga. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian dapat menurunkan kemampuan bekerja dan pendapatan, sehingga semakin membatasi kemampuan rumah tangga untuk memperbaiki kondisi hunian. Dengan kata lain, terbentuk suatu rantai kerentanan berupa hunian tidak layak, gangguan kesehatan, peningkatan beban pengeluaran, penurunan kapasitas kerja, dan rendahnya pendapatan.²⁰ Oleh sebab itu, peningkatan kualitas hunian tidak hanya dapat dipandang sebagai intervensi terhadap kondisi fisik rumah, tetapi juga sebagai

Singapura Dan Australia,” *Jurist-Diction* 4, no. 2 (March 5, 2021): 559, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25753>.

²⁰ Topik Ismail, Septiana Dwiputranti, and Nita Nurliawati, “Faktor Kesejahteraan Objektif Dalam Subjektifitas Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Wilayah Perkotaan,” *Jurnal Media Administrasi Terapan* 3, no. 2 (June 27, 2023): 158–67, <https://doi.org/10.31113/jmat.v3i2.63>.

²¹ Rizki Dwi Febrina and Djoko Suwandono, “Evaluasi Rumah Susun Klender Berdasarkan Kriteria Layak Huni,” *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 11, no. 2 (June 2, 2022): 76–84, <https://doi.org/10.14710/tpwk.2022.28835>.

upaya memutus salah satu mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesehatan, ketahanan ekonomi, serta kesejahteraan rumah tangga secara berkelanjutan.²²

Melihat kompleksitas persoalan kemiskinan perkotaan yang berkaitan dengan keterbatasan hunian, ketidakpastian status kepemilikan tanah, serta minimnya akses terhadap fasilitas dasar, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu program yang patut untuk ditelaah lebih mendalam adalah Program OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera) yang dilaksanakan di Kampung Blangkon, Surakarta. OPTIMIS atau rumah instan berbasis teknologi RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) merupakan inovasi rumah modular pracetak berstruktur panel yang dirakit cepat, efisien waktu dan biaya, tahan gempa, dan bisa diaplikasikan di lahan yang terbatas. Program ini menjadi bentuk intervensi pemerintah Jawa Tengah dan Surakarta dalam menjawab kebutuhan akan perumahan yang layak sekaligus berupaya mengatasi persoalan kemiskinan di perkotaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas program perbaikan perumahan dan penataan permukiman sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Harjanta dan Saputra, mengkaji program bedah rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni sebagai instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih fokus pada aspek skema pembiayaan program dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, objek penerima program

²² Adi Suhendra, "Social Innovation of Livablehome as a City Government Policy in Social Development in Prabumulih City," *International Journal of Regional Innovation* 2, no. 2 (May 31, 2022): 36–41, <https://doi.org/10.52000/ijori.v2i2.50>.

merupakan masyarakat yang menempati rumah pada lahan dengan status kepemilikan yang sudah legal, sehingga isu penguasaan lahan dan legalitas lahan tidak menjadi aspek yang dikaji.^{23,24} Sementara itu, penelitian Fadhilah dan Setiawan mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mengkaji capaian program dalam berbagai aspek serta pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas permukiman dapat memberikan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, meskipun pengaruhnya bersifat tidak langsung dan belum mampu mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Namun penelitian tersebut berfokus pada penanganan permukiman kumuh secara umum dan belum mengkaji secara khusus permasalahan hunian yang berada di atas tanah milik pemerintah beserta penyelesaian legalitas lahannya sebagai bagian dari intervensi program.²⁵

Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji program pengentasan kemiskinan yang menggabungkan tiga elemen sekaligus. Perbaikan fisik hunian liar di atas tanah negara, penataan kawasan kumuh, dan pemberian sertifikat kepemilikan yang sah sebagai bagian dari output program. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji Program OPTIMIS di Kampung Blangkon, Surakarta, yang secara khusus menyoar

²³ SL Harjanta, "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kulon Progo, Realisasi Janji Kampanye Bupati Hasto Wardoyo Di Tahun Pertama Pemerintahan Periode Ke Dua," *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)* 2, no. 1 (April 8, 2020): 38–48, <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v2i1.685>.

²⁴ Jevi Saputra, "Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah Di Kota Jambi," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 2 (December 11, 2022): 241–49, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1524>.

²⁵ Fadhilah Fadhilah and Bakti Setiawan, "Pengaruh Program KOTAKU Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Selumit Pantai," *TATALOKA* 24, no. 2 (May 31, 2022): 84–100, <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.2.84-100>.

perbaikan hunian liar di tanah milik pemerintah, penataan kawasan kumuh, sekaligus pemberian sertifikat kepemilikan yang sah kepada warga penerima program sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang lebih menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas maka rumusan masalahnya ini meliputi:

1. Bagaimana strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui Program OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera) di Kampung Blangkon Surakarta?
2. Bagaimana hasil (output) Program OPTIMIS bagi kesejahteraan Masyarakat Kampung Blangkon Surakarta?
3. Apa faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan Program OPTIMIS di Kampung Blangkon Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui Program OPTIMIS di Kampung Blangkon Surakarta.

2. Mendeskripsikan hasil (output) Program OPTIMIS bagi kesejahteraan Masyarakat Kampung Blangkon Surakarta.
3. Mendeskripsikan faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan Program OPTIMIS di Kampung Blangkon Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Hasil temuan ini diharapkan bermanfaat secara akademis bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang ada dalam lingkup Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dalam hal strategi pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan dasar berupa rumah layak huni yang belum banyak diteliti oleh mahasiswa PMI.
- b. Hasil penelitian ini menjadi bahan komparasi dan melengkapi kajian sebelumnya terkait strategi pengentasan kemiskinan, khususnya melalui penyediaan bantuan perumahan layak huni sebagai salah satu pendekatan berbasis kolaborasi lokal.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi akademik, terutama dalam kajian mengenai pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis perbaikan hunian tidak layak. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pemerintah, khususnya

untuk mengevaluasi dan memberi rekomendasi terhadap program yang sedang dikembangkan.

E. Kajian Pustaka

Penyusunan penelitian ini menggunakan data yang relevan agar mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah secara menyeluruh. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian pada topik yang sama.

Tinjauan Pustaka ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan untuk menghindari adanya persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi juga digunakan untuk menemukan unsur kebaruan di antara temuan yang akan dilaksanakan dengan kajian terdahulu. Meskipun demikian, kajian dengan tema serupa telah banyak dilakukan, namun memiliki objek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tinjauan Pustaka digunakan untuk melihat kebaruan penelitian sekaligus menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Walaupun penelitian dengan tema serupa telah banyak dilakukan, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek dan fokus kajiannya. Pada bagian akhir kajian pustaka ini, penulis memberikan kesimpulan terkait posisi penelitian ini.

Ada banyak penelitian tentang kemiskinan, namun jika dikerucutkan terkait dengan pengentasan kemiskinan ditemukan 8 tulisan. Tulisan-tulisan tersebut sebagian besar membahas mengenai strategi pengentasan kemiskinan, seperti penelitian saya

Pertama, tulisan milik Sri Budi Cantika, dengan judul “*Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam*”. Dalam artikel jurnal tersebut beliau mengedepankan pembahasan tentang sebab kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan menurut pandangan islam. Menurut pandangan islam, kemiskinan muncul akibat berbagai sebab struktural yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Penyebab kemiskinan ini meliputi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perilaku manusia (QS Ar Ruum:41), ketidakpedulian serta kebakhilan kaum kaya yang abai terhadap masyarakat miskin (QS Ali Imran:180), serta adanya ketidakadilan dan eksploitasi di antara manusia (QS At Taubah:34). Selain itu, konsentrasi kekuasaan politik, birokrasi, maupun ekonomi pada segelintir orang (QS Al Qashash:1-88) juga turut memperparah ketimpangan ekonomi, menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Lebih jauh lagi, gejolak eksternal seperti bencana alam dan peperangan sering kali membuat negeri yang sebelumnya makmur berubah menjadi miskin (QS Saba’: 14-15). Untuk mengatasi kemiskinan ini, Islam menawarkan strategi pengentasan berbasis kebijakan *pro-poor* yang berfokus pada lima bidang utama. Pertama, Konsep *pro-poor budgeting* dalam Islam memberikan penekanan pentingnya penyusunan maupun pengelolaan anggaran negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini diwujudkan melalui penguatan disiplin fiskal, pengimplementasian tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemanfaatan anggaran untuk kepentingan publik. Kedua, Islam juga mengedepankan *pro-poor growth*, yakni pertumbuhan ekonomi yang mampu

memberikan dampak maupun manfaatnya yang merata, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin maupun rentan. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang merata atau *pro-poor infrastructure* diyakini dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Keempat, penyediaan pelayanan publik dasar yang inklusif seperti birokrasi, pendidikan, dan kesehatan, atau *pro-poor public services*, dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat luas. Terakhir, distribusi pendapatan yang adil, atau *pro-poor income distribution*, diimplementasikan melalui berbagai instrumen, seperti aturan kepemilikan tanah, zakat, infak, qardul hasan, maupun wakaf, untuk memastikan kesejahteraan menyentuh setiap lapisan masyarakat. Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah kondisi yang harus diatasi secara menyeluruh dengan memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemerataan dan keadilan ekonomi bagi semua.²⁶

Kedua, disertasi yang disusun oleh Henny Herawaty Br. Dalimunthe dengan judul “*Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Potensi Diri Untuk Meningkatkan Kreativitas Kewirausahaan Di DKI Jakarta*”. Disertasi Dalimunthe membahas strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan berbasis potensi diri dengan mengembangkan model yang mengacu pada teori pemberdayaan, pendidikan nonformal, potensi diri, kreativitas, maupun kewirausahaan. Penelitian

²⁶ Sri Budi Cantika, “Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam,” *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (August 14, 2014): 101, <https://doi.org/10.22219/JIBE.Vol4.No2.101-114>.

Dalimunthe menekankan bahwasanya pengembangan potensi diri manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk berkembang dan keluar dari kemiskinan. Potensi diri seseorang, seperti bakat, keterampilan, dan kemampuannya, memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kemampuan individu untuk berkembang. Oleh karena itu, model pemberdayaan yang berfokus pada pengembangan potensi diri dianggap sebagai satu dari sekian langkah efektif guna menyelesaikan kemiskinan. Model ini bisa dijadikan panduan bagi fasilitator (orang yang membantu proses pemberdayaan) dan pengambil kebijakan dalam merancang strategi untuk membantu masyarakat miskin di perkotaan agar mereka dapat mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka.²⁷

Ketiga, skripsi Khusnul Khotimah dengan judul *“Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Pembahasan dan teori dalam skripsi ini berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui program bantuan rumah layak huni (BARULAHU). Kemiskinan merupakan kondisi yang tidak hanya sifatnya ekonomi, melainkan juga mencakup aspek ketiadaan aset, hambatan akses pada berbagai sumber daya, serta minimnya pendidikan maupun keterampilan. Program BARULAHU bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menyediakan rumah yang sesuai standar kesehatan, keamanan, maupun kenyamanan. Implementasi program ini

²⁷ Henny Herawaty Br Dalimunthe, “Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Potensi Diri untuk Meningkatkan Kreativitas Kewirausahaan di DKI Jakarta” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang mengikutsertakan pemerintah maupun masyarakat. Dari perspektif ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan dipandang sebagai tanggung jawab kolektif. Konsep "khalifah" menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, prinsip distribusi kekayaan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program ini. Temuan ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Temuan ini menegaskan bahwasanya program BARULAHU di Kecamatan Mesuji telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat tantangan dalam pemahaman masyarakat terkait manfaat program tersebut. Keberhasilan program diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Kajian Khusnul Khotimah menegaskan bahwasanya pengentasan kemiskinan memerlukan intervensi ekonomi yang didukung oleh kebijakan sosial berbasis keadilan.²⁸

Keempat, penelitian Ajinu Stefano Da Costa dengan judul *“Implementasi Program Rumah Layak Huni Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur”* menyoroti pelaksanaan program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwasanya program rumah layak huni sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan secara optimal, dan pemanfaatannya pun masih belum maksimal.

²⁸ Maldonado Rodríguez, Velastequí, “Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 2019, 1–23.

kondisi ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya target jumlah pembangunan rumah layak huni di wilayah tersebut.²⁹

Kelima, kajian Hidayah dan Wahyuningsih dengan judul “*Collaborative Governance Untuk Pengembangan Sustainable Green Tourism Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan* (Discourse Network Analysis pada geopark.kebumenkab.go.id)”. Artikel jurnal Hidayah dan Wahyuningsih membahas penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Geopark Karangsambung-Karangbolong melalui kolaborasi multi-pihak, seperti pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat, dan media. Konsep ini diterapkan dalam kerangka *sustainable green tourism* dengan fokus pada pelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan edukasi, yang memanfaatkan *geodiversity*, *biodiversity*, serta *cultural diversity* untuk konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dengan mengadopsi strategi berbasis diskriminasi positif, yang bertujuan menciptakan peluang ekonomi bagi kelompok marginal melalui pelatihan dan fasilitasi usaha kecil. Penelitian ini juga mengeksplorasi peluang seperti dukungan kebijakan dan potensi lokal, serta hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan tantangan infrastruktur. Melalui metode *discourse network analysis* (DNA), penelitian ini memetakan posisi dan peran aktor dalam jaringan komunikasi. Pendekatan ini mengarahkan pengembangan Geopark Karangsambung-Karangbolong untuk menjadi kawasan wisata berkelanjutan

²⁹ Ajinu Da Costa, “Implementasi Program Rumah Layak Huni dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

yang berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.³⁰

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Winarno dengan judul *“Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung”*. Penelitian ini membahas program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sebagai upaya mengatasi permasalahan perumahan yang kompleks akibat faktor ekonomi, keterbatasan lahan, dan rendahnya partisipasi pengembang. Pemerintah Kabupaten Belitung bertindak sebagai fasilitator utama melalui kebijakan dan implementasi yang sesuai dengan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2013 tentang Basis Data Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kesesuaian program dengan sasaran penerima manfaat serta mekanisme bantuan yang diberikan. Dalam tinjauan literatur, dijelaskan bahwasanya penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan penghuninya. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur, dan rendahnya keterlibatan masyarakat serta dunia usaha. Berbagai teori mendukung pembahasan ini, termasuk konsep "housing queue" untuk menentukan prioritas penerima manfaat, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengadaan perumahan berbasis komunitas. Selain itu, peran pemerintah daerah sangat signifikan dalam mengurangi backlog perumahan melalui penyediaan

³⁰ Salma Arum Hidayah and Rutiana Dwi Wahyunengseh, "Collaborative Governance Untuk Pengembangan Sustainable Green Tourism Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Discourse Network Analysis Pada Geopark.Kebumenkab.Go.Id)," *Wacana Publik* 1, no. 2 (2021): 431, <https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54604>.

perumahan berbasis APBD, bantuan sosial, dan program kemitraan seperti CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya program ini telah memenuhi sasaran, namun terdapat tantangan dalam pengelolaan pasca-pembangunan, terutama terkait pencatatan aset dan keberlanjutan manfaat program. Dengan demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program dan mencegah potensi konflik di masa mendatang. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam konteks desentralisasi penyediaan perumahan di Indonesia.³¹

Ketujuh, penelitian oleh Triani yang berjudul *“Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Palembang”*. Jurnal ini membahas strategi pengentasan kemiskinan di Kota Palembang melalui pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dipengaruhi oleh faktor seperti akses pada modal, pendidikan, serta pekerjaan. Teori yang digunakan meliputi lingkaran kemiskinan maupun klasifikasi kemiskinan relatif serta absolut. Strategi pemberdayaan berfokus pada pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pembangunan infrastruktur, dengan lembaga keuangan mikro sebagai pendukung. Pendekatan holistik dan berbasis komunitas dianggap penting untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.³²

Kedelapan, penelitian oleh Anggraini yang berjudul *“Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban”*. Di jurnal

³¹ Bambang Winarno, “Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung,” *Jurnal Pengembangan Kota* 6, no. 1 (2018): 66, <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74>.

³² Yesi Triani, Maya Panorama, and Rinol Sumantri, “Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang,” *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 158, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.635>.

tersebut, tulisan Anggraini mengulas evaluasi terhadap Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban yang bermaksud menaikkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah lewat penyediaan rumah yang layak. Penelitian ini menerapkan model evaluasi kebijakan yang dijelaskan Leo Agustino mencakup lima indikator kunci: (1) sumber daya aparatur, (2) kelembagaan, (3) sarana, prasarana, maupun teknologi, (4) aspek finansial, serta (5) regulasi. Program ini dilakukan dengan dua skema, yaitu kontraktual dan swadaya, yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya program telah berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh realisasi 5.276 unit rumah selama 2016-2020. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya sarana prasarana, dan belum meratanya sosialisasi hingga tingkat desa. Regulasi program masih merujuk pada Permensos No. 20 Tahun 2017 tanpa dukungan regulasi lokal. Jurnal ini menyoroti pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan regulasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program rehabilitasi rumah tidak layak huni.³³

Berdasarkan delapan kajian tersebut penelitian saya sama-sama meneliti tentang strategi pengentasan kemiskinan, bahkan hampir semua meneliti pengentasan kemiskinan berbasis pembangunan perumahan. Hal yang menjadi pembeda penelitian saya dengan kajian yang lain ada pada perbedaan lokasi.

³³ Bintari Laras Anggraini and Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kabupaten Tuban," *Publika*, 2021, 309–22, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p309-322>.

Selain itu penekanan penelitian saya lebih pada melihat dampak program pembangunan perumahan dengan pengentasan kemiskinan. Satu karakter masyarakat miskin adalah tinggal di kawasan kumuh yang menyebabkan terjadinya siklus kemiskinan antar generasi, penelitian ini berupaya melihat lebih jauh, apakah hanya cukup dengan menyelesaikan persoalan hunian maka unsur kemiskinan yang lain akan teratasi.

F. Landasan Teori

1. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi secara umum dapat diartikan sebagai rencana sistematis yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan penempatan sumber daya yang efisien. Sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan suatu rancangan perencanaan yang disusun secara matang dalam upaya mencapai target atau tujuan tertentu.³⁴ Dalam konteks Pembangunan, strategi diartikan sebagai rencana dan langkah sistematis yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai perspektif dari para ahli menunjukkan pentingnya strategi dalam mewujudkan Pembangunan yang efektif dan inklusif di suatu daerah.

Para ahli menyebutkan bahwasanya strategi pembangunan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Diniyanto mencatat bahwasanya beberapa daerah mengalami kesulitan dalam

³⁴ Kemendikbud.go.id,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>.

“Pengertian Strategi,” n.d.,

Pembangunan akibat keterbatasan anggaran. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Dana Cadangan diusulkan sebagai strategi alternatif untuk mendukung Pembangunan daerah, yang dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan atau permasalahan Pembangunan yang mendesak.³⁵ Dengan demikian, kebijakan keuangan yang strategis memainkan peran penting dalam kesuksesan pembangunan.

Selanjutnya, Hariyatie menekankan pentingnya kerjasama lintas batas (KLB) dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di kawasan perbatasan yakni Kalimantan.³⁶ Kerjasama yang dibangun dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya dapat mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarnegara serta mempromosikan integrasi regional. Ini menunjukkan bahwasanya strategi pembangunan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus mengikutsertakan berbagai stakeholder guna memperoleh hasilnya yang optimal.

Dalam penelitian oleh Darmawan dan Suprpta, terungkap bahwasanya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Buleleng menggunakan strataegi analisis SWOT untuk merumuskan perencanaan Pembangunan.³⁷ Strategi ini dibagi menjadi empat kategori:

³⁵ A DIniyanto, "Peraturan Daerah Dana Cadangan: Strategi Alternatif Pembangunan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 478–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>.

³⁶ N Hariyatie, "Kerjasama Kawasan Perbatasan Dan Pembangunan Daerah Kalimantan (Border Regional Cooperation and Regional Development in Kalimantan)," *Proyeksi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 20, no. 2 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/proyeksi.v20i02.906>.

³⁷ I Nyoman Suprpta Nyoman Doddy Darmawan, "Strategi Bappeda Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Buleleng," *Locus* 12, no. 2 (2020): 30–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/locus.v12i2.602>.

memanfaatkan kekuatan dan peluang, mengatasi ancaman, serta mengurangi kelemahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwasanya strategi harus adaptif terhadap kondisi lokal dan tantangan yang dihadapi.

Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, studi oleh Issundari dan Yani menyatakan bahwasanya strategi Pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.³⁸ Hal ini penting, mengingat globalisasi mendorong setiap daerah untuk bersaing dalam Pembangunan, sehingga strategi yang adaptif dan responsif menjadi faktor kunci dalam mengatasi berbagai isu sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan harus terintegrasi, melibatkan kolaborasi antar lembaga, serta memperhatikan konteks lokal maupun global. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan adalah isu multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik fisik, sosial, maupun kapabilitas individu. Menurut World Bank (1990), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam pemenuhan standar hidup minimal.³⁹ Di tahun 2004, definisi ini diperluas menjadi lebih mendalam dan multidimensi, kemiskinan tidak hanya terkait kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup kelaparan, ketiadaan tempat

³⁸ Yanyan Mochamad Yani Sri Issundari, "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kerja Sama Internasional Daerah.," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366>.

³⁹ Anthony Bebbington, "Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty," *World Development* 27, no. 12 (December 1999): 2021–44, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00104-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00104-7).

tinggal, ketidakmampuan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, kehilangan pekerjaan, serta kekhawatiran akan masa depan.⁴⁰⁴¹

Pattinama menambahkan bahwasanya kemiskinan juga melibatkan keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, kondisi ketidakberdayaan, serta hambatan dalam menyuarkan pendapat.⁴² Sejalan dengan itu, Amartya Sen mendefinisikan kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas, yaitu kondisi ketika seseorang tidak memiliki kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat, sehingga kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga peluang yang tersedia bagi individu.⁴³

Kemiskinan sebagai kondisi yang ditandai oleh kurangnya pendapatan, kelaparan, malnutrisi, ketiadaan layanan dasar, perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta terbatasnya pasrtisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.⁴⁴ Todaro dan Smith turut menjelaskan bahwasanya kemiskinan dapat dinilai dari dimensi moneter maupun nonmoneter, termasuk

⁴⁰ Anthony Bebbington, "Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty," *World Development* 27, no. 12 (December 1999): 2021–44, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00104-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00104-7).

⁴¹ Bebbington.

⁴² Marcus J. Pattinama, "Poverty Reduction through Local Wisdom (A Case Study from Buru Island-Maluku and Surade-West Java)," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 13, no. 1 (July 1, 2009): 1, <https://doi.org/10.7454/mssh.v13i1.195>.

⁴³ Mathias Jebaru Adon, Gaspar Triono Jeraman, and Yusep Andrianto, "Kontribusi Teori Kemiskinan sebagai Deprivasi Kapabilitas Dari Amartya Sen dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin," *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 8, no. 1 (June 20, 2023): 1, <https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.22295>.

⁴⁴ Adis Imam Munandar, Aji Wahyu Ramadhani, And Palupi Lindiasari Samputra, "Kemiskinan Anak di DKI Jakarta: Pendekatan Multiple Overlapping Deprivation Analysis," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 3, no. 3 (February 20, 2020): 306–23, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4125>.

tingkat partisipasi sosial dan kualitas hidup secara menyeluruh.⁴⁵ Artinya, kemiskinan bisa menampilkan karakteristik yang berbeda antardaerah, disebabkan oleh variasi dalam kepemilikan sumber daya alam, kualitas SDM, keadaan ekonomi, dan system kelembagaan.⁴⁶

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Penetapan status kemiskinan menggunakan garis kemiskinan, yakni besaran pengeluaran minimum per kapita yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan ini mencakup konsumsi sekitar 2.100 kalori per hari serta kebutuhan non-makanan lainnya.^{47 48} Hal ini sejalan dengan pernyataan Telaumbanua dan Ndraha, yang menyebutkan ketidakmampuan guna mendapat maupun memenuhi kebutuhan pokok, di antaranya akses pada pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, serta layanan kesehatan, sebagai situasi yang memberikan gambaran kemiskinan pada individu ataupun kelompok masyarakat.⁴⁹

⁴⁵ Anthony Dornubari Enwin and Tamunoikuronibo Dawaye Ikiriko, "Understanding the Challenges of Affordable Housing Provision in Nigeria: An Analysis of Key Faktors and Policy Implications," *European Journal of Theoretical and Applied Sciences* 1, no. 4 (July 6, 2023): 420–36, [https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(4\).38](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(4).38).

⁴⁶ "Effect of Mortgage Financing and Affordability on the Performance of Public - Private Partnership in Housing Provision," *Public Policy and Administration Research*, September 2021, <https://doi.org/10.7176/PPAR/11-7-06>.

⁴⁷ Febritesna Nuraini et al., "Coping Strategy Keluarga Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Selama Bulan Ramadhan," *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (April 14, 2023): 13–25, <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.25165>.

⁴⁸ Quarthano Reavindo, "Pengaruh IPM Dan Laju Pertumbuhan PDRB Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Karo Tahun 2011-2019," *Syntax Idea* 3, no. 4 (April 20, 2021): 903–15, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i4.1121>.

⁴⁹ Fetriaman Telaumbanua and Ayler Beniah Ndraha, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Ekologi Manajemen Di Kabupaten Nias," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 10, no. 2 (August 30, 2023): 1631–44, <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.51798>.

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi di mana seseorang ataupun kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Definisi ini kemudian menjadi dasar penyusunan beragam program perlindungan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, maupun intervensi pengentasan kemiskinan lainnya.⁵⁰ Pendekatan kebutuhan dasar ini sejalan dengan pendapat Bukhari yang melihat kemiskinan dari ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhannya yang mendasar yang dinilai dari pengeluaran.⁵¹

Selain unsur ekonomi, beberapa penelitian akademis menekankan pentingnya melihat kemiskinan secara holistik. Ferdiansyah et al., menyatakan bahwasanya kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan antara Pendidikan, ekonomi, dan Kesehatan.⁵² Dengan demikian, pengukuran kemiskinan tidak hanya berbasis pendapatan, tetapi juga kondisi hunian, akses terhadap fasilitas publik, Kesehatan, dan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwasanya kemiskinan adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan pendapatan. Kemiskinan mencakup keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, rendahnya akses terhadap layanan sosial, rendahnya kapabilitas individu,

⁵⁰ Febri Fajar Pratama and Deni Chandra, "Dampak Strategis Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan Pada Masa Pandemi COVID-19 Melalui Program PKH Di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 1 (June 1, 2022): 63–76, <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41238>.

⁵¹ Eri Bukhari, "Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 2 (May 27, 2021): 219–28, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>.

⁵² Indra Ferdiansyah et al., "Analisis Clustering Menggunakan Metode K-Means Pada Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2020," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 5, 2024): 858–69, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10360>.

serta minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan pendekatan yang bersifat utuh, mencakup berbagai aspek, dan disesuaikan dengan konteks lokal.

Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, Sharp (dalam Kuncoro, 1996) menjelaskan bahwasanya terdapat tiga aspek utama penyebab kemiskinan:

a. Ketimpangan Kepemilikan Sumber Daya

Dalam mikro, kemiskinan muncul akibat adanya ketimpangan kepemilikan sumber daya di antara individu, yang kemudian berdampak pada perbedaan tingkat pendapatan. Indikator ini menunjukkan bagaimana ketidakmerataan dalam hak milik akan sumber daya, seperti lahan, modal, dan akses terhadap pekerjaan yang berpotensi menghasilkan pendapatan, dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang signifikan di masyarakat.⁵³

b. Perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor kedua Adalah perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, yakni Pendidikan dan keterampilan. Individu yang memiliki akses terhadap Pendidikan yang lebih berkualitas umumnya memungkinkan seseorang guna memperoleh pekerjaan yang lebih baik maupun memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi.⁵⁴ Penelitian

⁵³ Fifi Nurulita, K Kamaruddin, and A Asmini, "Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 11, no. 2 (August 29, 2023): 261–72, <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i2.1314>.

⁵⁴ Nurulita, Kamaruddin, and Asmini.

oleh Sari dan Susetiawan juga menekankan pentingnya pendidikan dalam menentukan status Kesehatan dan ekonomi individu, di mana Pendidikan yang rendah sering kali berkorelasi dengan kemiskinan.⁵⁵

c. Perbedaan akses dalam modal

faktor ketiga yang diidentifikasi adalah perbedaan dalam akses modal. Masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pembiayaan, seperti pinjaman bank atau investasi, akan sulit untuk memulai usaha atau meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat memperburuk keadaan mereka dalam mempertahankan kesejahteraan ekonomi.⁵⁶

Selain itu, Ginandjar menyebutkan beberapa faktor lain yang memicu kemiskinan, yaitu: tingkat Pendidikan yang rendah, derajat Kesehatan yang buruk, minimnya lapangan kerja, serta kondisi terisolasi.⁵⁷ World Bank juga menyoroti beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain: Pendidikan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, akses terhadap layanan kesehatan dasar, kondisi infrastruktur serta letak geografis.⁵⁸

Sebagaimana situasi kemiskinan yang dipahami sebagai permasalahan yang bersifat multidimensional, Suryawati dalam jurnalnya menjelaskan bahwasanya kemiskinan memiliki empat bentuk. Adapun

⁵⁵ Delfia Tanjung Sari and Muhammad Dani Susetiawan, "Socioeconomic Determinants of Health Status; Evidence from Nusa Tenggara Barat – Indonesia," *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis* 6, no. 1 (August 12, 2025): 72–88, <https://doi.org/10.25077/mssb.6.1.72-88.2025>.

⁵⁶ Nurulita, Kamaruddin, and Asmini, "Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa."

⁵⁷ Sari and Susetiawan, "Socioeconomic Determinants of Health Status; Evidence from Nusa Tenggara Barat – Indonesia."

⁵⁸ Ferdiansyah et al., "Analisis Clustering Menggunakan Metode K-Means Pada Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2020."

bentuk-bentuk kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut⁵⁹:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan situasi di mana pendapatan seseorang ataupun sekelompok masyarakat masih kurang dari batas garis kemiskinan, sehingga kebutuhan dasar di antaranya pangan, sandang, kesehatan, tempat tinggal, maupun pendidikan tidak dapat terpenuhi secara layak. Garis kemiskinan sendiri mengacu pada rerata pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Konsep kemiskinan absolut sering digunakan sebagai dasar dalam menentukan kategori masyarakat miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan yang muncul akibat ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kondisi ini terjadi karena hasil pembangunan belum dapat dirasakannya secara merata dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan. Wilayah yang belum tersentuh pembangunan umumnya dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

⁵⁹ Suryawati Chriswardani, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional," *JMPK* 08, no. 03 (2005): 122.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural yakni kemiskinan yang berkaitan dengan pola perilaku, kebiasaan, maupun nilai budaya dalam masyarakat yang dapat menghambat upaya peningkatan taraf hidup. Bentuk kemiskinan ini ditandai dengan sikap kurang produktif, rendahnya ketergantungan terhadap pihak lain dalam memenuhi kebutuhan.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan wujud kemiskinan yang terjadi akibat terbatasnya akses masyarakat pada sumber daya, kesempatan, maupun system sosial dan politik yang tidak mendukung peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak adil dan dapat mengandung unsur diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Rondinelli, (1990:91) menjelaskan bahwasanya terdapat tiga strategi dasar dalam program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin,⁶⁰ yaitu:

- a. Bantuan diberikan kepada wilayah yang sebagian besar penduduknya berada dalam kondisi miskin melalui program pembangunan desa terpadu maupun kegiatan pelayanan dan produksi yang berfokus pada masyarakat pedesaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memfokuskan intervensi di area di mana komunitas miskin tinggal,

⁶⁰ Dennis A. Rondinelli, "Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response," *Development and Change* 21, no. 3 (July 22, 1990): 491–500, <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1990.tb00385.x>.

sehingga program yang dilaksanakan dapat secara langsung memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan Pembangunan terpadu yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Melalui proyek yang berfokus pada kebutuhan lokal, bantuan yang disalurkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.⁶¹

- b. Bantuan difokuskan pada upaya mengatasi rendahnya standar kehidupan masyarakat miskin melalui program pemenuhan kebutuhan standar manusia. Dalam strategi ini, bantuan diarahkan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, di antaranya kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap air bersih serta makanan. Dalam konteks pendekatan kebutuhan dasar (basic human needs), penyediaan rumah layak huni termasuk intervensi esensial untuk memperbaiki standar hidup masyarakat miskin. Penelitian oleh Alkire dan Santos (2010) menunjukkan bahwasanya pengukuran kemiskinan yang mempertimbangkan dimensi multidimensional, termasuk standar kehidupan yang layak, dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai kondisi masyarakat miskin maupun cara mengintervensi dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.^{62,63}

⁶¹ L. Kleemeier, "Policy Reform and Rural Development Assistance in Tanzania," *Public Administration and Development* 9, no. 4 (September 19, 1989): 405–16, <https://doi.org/10.1002/pad.4230090407>.

⁶² Sabina Alkire and Maria Emma Santos, "Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries," *SSRN Electronic Journal*, 2010, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1815243>.

⁶³ Ranajit Ghosh and Prolay Mondal, "Unveiling the Complex Facets of Poverty: Unidimensional and Multidimensional Insights from Rural Areas of Suri Sadar Sub-Division, Birbhum District, Eastern India," *Societies* 14, no. 4 (April 17, 2024): 54, <https://doi.org/10.3390/soc14040054>.

c. Bantuan diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi serupa yang menyebabkan mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, melalui program atau proyek yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat tertentu. Ini memerlukan identifikasi yang baik terhadap kelompok-kelompok tertentu yang rentan terhadap kemiskinan dan intervensi berbasis kelompok. Kelemahan kelompok sosio-ekonomi tertentu sering kali berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Kegiatan berbasis kelompok dapat diposisikan sebagai strategi untuk memberdayakan individu dengan latar belakang ekonomi serupa agar dapat saling mendukung dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.⁶⁴⁶⁵

Meskipun strategi dasar yang dijelaskan oleh Rondinelli memberikan gambaran mengenai pola intervensi yang dapat diterapkan kepada masyarakat miskin, perkembangan teori kebijakan publik menunjukkan adanya pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merancang program yang benar-benar berpihak pada kelompok miskin. Pendekatan tersebut dikenal sebagai *pro-poor strategy*.

Konsep *pro-poor strategy* merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan kelompok miskin sebagai prioritas utama dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan.

⁶⁴ Xiaonan Qin et al., "Research on the Development Potential of China's Pro-Poor Tourism Industry Based on Geographical Nature Evaluation," *Sustainability* 14, no. 22 (November 14, 2022): 15069, <https://doi.org/10.3390/su142215069>.

⁶⁵ Channing Arndt and Kenneth R. Simler, "Estimating Utility-Consistent Poverty Lines with Applications to Egypt and Mozambique," *Economic Development and Cultural Change* 58, no. 3 (April 2010): 449–74, <https://doi.org/10.1086/650413>.

Adapun tujuannya dari strategi guna memberikan kepastian bahwasanya kebijakan dan intervensi pemerintah memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk miskin, baik melalui peningkatan kesejahteraan, penguatan kapasitas, maupun pengurangan kerentanan mereka. Menurut Kakwani dan Pernia (2003), *pro-poor strategy* adalah kerangka pembangunan yang dirancang agar pertumbuhan dan intervensi kebijakan mampu menciptakan manfaat secara langsung bagi kelompok berpendapatan rendah. Konsep ini menekankan bahwasanya pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada aspek pemerataan, inklusivitas, dan pengurangan ketimpangan pendapatan.⁶⁶ Sementara itu, UNDP (2006) menjelaskan bahwasanya strategi *pro-poor* mencakup upaya sistematis untuk memfasilitasi masyarakat miskin memperoleh akses terhadap aset dasar, layanan publik, dan perlindungan sosial yang memadai. Dalam konteks pembangunan sosial, *pro-poor strategy* sering diterapkan melalui berbagai bentuk intervensi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kapasitas masyarakat, serta penciptaan lingkungan sosial ekonomi yang mampu meningkatkan peluang mobilitas sosial bagi kelompok miskin.⁶⁷ Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek material, melainkan juga mencakup aspek struktural yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin,

⁶⁶ Nanak Kakwani and Hyun H. Son, "Pro-Poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies (Distinguished Lecture)," *The Pakistan Development Review*, December 1, 2003, 417–44, <https://doi.org/10.30541/v42i4Ipp.417-444>.

⁶⁷ Anindya Mitra Raisnur Putri, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, and Abdul Ghafar Ismail, "A Systematic Review on Multidimensional Poverty Measurement," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 8 (December 3, 2024), <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5041>.

termasuk ketimpangan akses terhadap layanan, legalitas aset, dan pengambilan Keputusan.⁶⁸ Literatur pembangunan mengidentifikasi beberapa bentuk utama strategi *pro-poor* yang umum digunakan dalam kebijakan publik dan program sosial:

- a. *Pro-poor growth*. Ini adalah strategi yang menekankan bahwasanya pertumbuhan ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor* berfokus pada menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan output yang lebih tinggi, tetapi juga mengurangi kemiskinan secara signifikan.⁶⁹
- b. *Pro-poor budgeting*. Strategi ini melibatkan pengalokasian anggaran pemerintah dengan cara yang memprioritaskan pengeluaran untuk masyarakat miskin. *Pro-poor budgeting* menekankan pentingnya merancang anggaran yang transparan dan akuntabel, di mana alokasi dana diputuskan melalui proses yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya program-

⁶⁸ Ernawati Ernawati, Tajuddin Tajuddin, and Syamsir Nur, "Does Government Expenditure Affect Regional Inclusive Growth? An Experience of Implementing Village Fund Policy in Indonesia," *Economies* 9, no. 4 (November 2, 2021): 164, <https://doi.org/10.3390/economies9040164>.

⁶⁹ Richard Manning, "Pro-Poor Growth: Negotiating Consensus on a Contentious Issue," *Development* 50, no. 2 (June 21, 2007): 42–47, <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1100357>.

program yang mendukung pengentasan kemiskinan mendapatkan sumber daya yang cukup dan tepat sasaran.⁷⁰

- c. *Basic need approach*. Strategi ini menekankan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai fondasi utama pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut terpenuhinya kebutuhan minimum di antaranya makanan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, maupun hunian layak, akibat terbatasnya akses dalam memenuhi kebutuhan dasar terbukti berdampak signifikan pada kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat miskin.⁷¹
- d. *Asset reform / redistribution*. Strategi ini menekankan reformasi dalam kepemilikan dan distribusi aset. Ini meliputi pemberian akses yang lebih adil pada tanah, modal, maupun sumber daya lainnya, yang sering kali tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Dengan mendistribusikan aset secara lebih merata, masyarakat miskin dapat memiliki sumber daya yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam usaha dan mengubah status ekonomi mereka.⁷²
- e. *Empowerment/Community-Based Development*. Pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif berbasis komunitas. Pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas

⁷⁰ L. Laterveer, "Pro-Poor Health Policies in Poverty Reduction Strategies," *Health Policy and Planning* 18, no. 2 (June 1, 2003): 138–45, <https://doi.org/10.1093/heapol/czg018>.

⁷¹ Luc Christiaensen, Lionel Demery, and Jesper Kuhl, "The (Evolving) Role of Agriculture in Poverty Reduction—An Empirical Perspective," *Journal of Development Economics* 96, no. 2 (November 2011): 239–54, <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.10.006>.

⁷² Jesper Kuhl, Luc Christiaensen, and Lionel Demery, *The Role Of Agriculture In Poverty Reduction An Empirical Perspective* (World Bank, Washington, DC, 2006), <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4013>.

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menjalankan proyek-proyek pembangunan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan program dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil yang dicapai.⁷³

2. Hasil (output) bagi Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, program dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perencanaan atau seperangkat tindakan yang terstruktur maupun terencana, yang ditujukan dalam mencapai tujuan tertentu dalam kebijakan dan administrasi publik. Dalam literatur terkait implementasi kebijakan, terdapat penegasan bahwasanya program dipandang sebagai instrument penting dari proses penyusunan kebijakan publik yang diharapkan memberikan pengaruhnya dengan positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Dalam konteks pembangunan, program merujuk pada intervensi sistematis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kondisi sosial ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat. Program pembangunan biasanya mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan ekonomi, penguatan kapasitas, hingga pemberdayaan sosial masyarakat, dengan menekankan

⁷³ Zarkasyi Rahman Amni and Novitasari Diyah, "Triple Helix in the Poverty Reduction Policy Based on Community Empowerment in Semarang City," ed. Hadiyanto, Maryono, and Budi Warsito, *E3S Web of Conferences* 73 (December 21, 2018): 10005, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187310005>.

⁷⁴ Faqiha Putri Ramadhaniar and Evi Satispi, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Permodalan Nasional Madani Melalui Program Ruang Pintar," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 3 (September 27, 2022): 154–66, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i3.644>.

pentingnya partisipasi masyarakat. Hasba dan Syahrul menunjukkan bahwasanya dalam program Pembangunan mendorong masyarakat berpikir jangka Panjang, meskipun partisipasi tersebut belum sepenuhnya optimal di tingkat desa.⁷⁵ Selain partisipasi, penelitian Mansyur et al. menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang tepat dan transparan dalam mendukung keberhasilan program Pembangunan.⁷⁶

Salah satu perspektif penting dalam kajian pembangunan adalah konsep pemberdayaan, yang digunakan untuk memahami sejauh mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek dalam suatu intervensi.⁷⁷ Meskipun tidak semua program pembangunan merupakan program pemberdayaan, konsep ini tetap relevan karena menekankan peningkatan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengelola serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.⁷⁸ Dalam pembahasannya, partisipasi masyarakat menjadi unsur kunci yang membedakan tingkat pemberdayaan dalam program. Haldane et al. menjelaskan bahwasanya partisipasi prosedur hanya menempatkan masyarakat sebagai bagian formal dari proses, seperti konsultasi public atau diskusi

⁷⁵ Sandra Hasba and Syahrul Syahrul, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan : Kasus Kelurahan Bungguosu, Konawe," *Shautut Tarbiyah* 24, no. 1 (October 4, 2018): 127, <https://doi.org/10.31332/str.v24i1.924>.

⁷⁶ Jusmianty Mansyur, Imam Suyitno, and Muhammad Akbal, "Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Phinisi Integration Review* 5, no. 1 (February 28, 2022): 182, <https://doi.org/10.26858/pir.v5i1.31727>.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, Edi Basuno, and Gelar Satya Budhi, "Esensi Dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 25, no. 2 (August 12, 2016): 73, <https://doi.org/10.21082/fae.v25n2.2007.73-88>.

⁷⁸ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif," *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 1, no. 2 (October 21, 2021): 82–110, <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.

kelompok, tanpa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir.⁷⁹ Sebaliknya, sebagaimana dijelaskan oleh Sabiq et al., partisipasi berbasis pemberdayaan mendorong masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berperan aktif dalam pengambilan Keputusan dan menciptakan keberlanjutan sosial.⁸⁰

Dalam ranah kebijakan sosial, program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan merupakan serangkaian intervensi terencana, sistematis, dan berbasis kebijakan yang disusun oleh negara untuk mengurangi, mencegah, dan mengatasi kondisi kemiskinan yang dialami individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat. Program ini berlandaskan regulasi seperti UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.^{81,82} Penanggulangan kemiskinan dipahami secara multidimensi, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, sanitasi, serta kesempatan ekonomi yang adil. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan harus mampu menjawab ketidakmampuan struktural yang menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

⁷⁹ Victoria Haldane et al., "Community Participation in Health Services Development, Implementation, and Evaluation: A Systematic Review of Empowerment, Health, Community, and Process Outcomes," ed. Cathy Maulsby, *PLOS ONE* 14, no. 5 (May 10, 2019): e0216112, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216112>.

⁸⁰ Ahmad Sabiq, Adhi Iman Sulaiman, and Toto Sugito, "Family Empowerment Program as Community Education in Supporting the Prevention of the Covid-19 Pandemic," *International Educational Research* 3, no. 3 (September 19, 2020): p22, <https://doi.org/10.30560/ier.v3n3p22>.

⁸¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," Pub. L. No. LN 2009 No. 12, Pemerintah Republik Indonesia (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>.

⁸² Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan," Pub. L. No. Peraturan Presiden No. 15/2010 (2010), <https://bphn.go.id/data/documents/10pr015.pdf>.

Dalam konteks evaluasi program, output merupakan hasil langsung yang muncul dari pelaksanaan kegiatan program. Output bersifat terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan menggambarkan capaian nyata dari aktivitas program sebelum menghasilkan perubahan jangka panjang (outcome).⁸³ Dalam program penanggulangan kemiskinan, output dapat berupa pembangunan rumah layak huni, penyediaan akses air bersih, pelatihan keterampilan, atau distribusi asset produktif. Perbedaan antara output dan outcome terletak pada sifatnya. Output menggambarkan hasil langsung, sedangkan outcome menunjukkan perubahan jangka Panjang seperti peningkatan Kesehatan, produktivitas ekonomi, atau penurunan tingkat kemiskinan.⁸⁴

Untuk memahami hubungan antara kegiatan program dan perubahan yang dihasilkan, penelitian ini menggunakan model logika (*logic model*) sebagai kerangka evaluasi. Model logika merupakan alat perencanaan dan evaluasi program yang mengorganisasi unsur-unsur penting program dalam kategori sistematis: *input, activities, outputs, outcomes, dan impact*. Model ini secara formal diperkenalkan oleh W.K. Kellogg Foundation melalui *Logic Model Development Guide* (2004) dan banyak digunakan dalam evaluasi

⁸³ Sofyan Yamin and Teguh Dartanto, "Pengentasan Orang Miskin Di Indonesia: Peran Modal Sosial Yang Terlupakan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 17, no. 1 (July 1, 2016): 88–102, <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i1.656>.

⁸⁴ Annisa Larasati Chairani, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Palembang," *Iapa Proceedings Conference*, October 31, 2024, 325, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1062>.

program sosial karena membantu memetakan alur logis dari pelaksanaan program hingga dampak akhirnya.⁸⁵⁸⁶

Input mencakup sumber daya seperti pendanaan, tenaga kerja, dan fasilitas. *Activities* adalah tindakan spesifik yang dilaksanakan dalam program. *Outputs* merupakan produk langsung dari aktivitas program, sementara *Outcomes* menggambarkan perubahan pada individu atau kelompok sasaran. *Impact* merujuk pada perubahan jangka panjang di tingkat masyarakat atau sistem. Dengan kerangka ini, evaluasi dapat melihat apakah output yang dihasilkan program telah berada pada jalur yang tepat untuk menghasilkan outcome dan impact yang diharapkan.⁸⁷⁸⁸

Dalam kerangka penilaian kesejahteraan, BPS mendefinisikan kesejahteraan sebagai kemampuan individu atau keluarga memenuhi kebutuhan dasar, baik materi maupun non-materi.⁸⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 juga menegaskan bahwasanya kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan

⁸⁵ W. William Chen, Jiunn-Jye Sheu, and Chung-Bang Weng, "Assess the Impact of an Online Tobacco Prevention Training Program on Teachers and Their Students," *Journal of Drug Education* 43, no. 2 (June 9, 2013): 141–53, <https://doi.org/10.2190/DE.43.2.c>.

⁸⁶ Rose McAndrew and Vicki Kaskutas, "Use of a Logic Model to Develop an Innovative Hand Therapy Clinic to Provide Experiential Learning for Occupational Therapy Students," *Journal of Occupational Therapy Education* 4, no. 3 (January 1, 2020), <https://doi.org/10.26681/jote.2020.040316>.

⁸⁷ Karen Torghele et al., "Logic Model Use in Developing a Survey Instrument for Program Evaluation: Emergency Preparedness Summits for Schools of Nursing in Georgia," *Public Health Nursing* 24, no. 5 (September 14, 2007): 472–79, <https://doi.org/10.1111/j.1525-1446.2007.00658.x>.

⁸⁸ Håkan Uvhagen et al., "What Happened and Why? A Programme Theory-Based Qualitative Evaluation of a Healthcare-Academia Partnership Reform in Primary Care," *BMC Health Services Research* 19, no. 1 (December 1, 2019): 785, <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4665-1>.

⁸⁹ Vinanda Sonya Permatasari and Lia Yuliana, "Penerapan Regresi Logistik Biner Pada Status Kesejahteraan Rumah Tangga Di Provinsi Bali Tahun 2020," *Seminar Nasional Official Statistics* 2021, no. 1 (November 1, 2021): 497–506, <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.943>.

dasar yang layak, rasa aman, serta kemampuan untuk mengembangkan diri.⁹⁰ Perspektif pembangunan nasional, seperti yang dijelaskan Bappenas, memandang kesejahteraan sebagai kondisi holistic yang mencakup aspek sosial, ekonomi, Kesehatan, akses layanan public, dan lingkungan hidup.⁹¹ Para ahli seperti Amartya Sen menambahkan bahwasanya kesejahteraan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai, sedangkan Todaro dan Dunn menyoroti pentingnya dimensi kesehatan, pendidikan, dan distribusi pendapatan.⁹²

Salah satu dimensi penting kesejahteraan adalah kondisi hunian. Kajian Sanjaya et al., menunjukkan bahwasanya konsep hunian layak tidak hanya mempunyai kaitannya dengan kondisi fisik bangunan, melainkan juga mencakup ketersediaan fasilitas dasar, di antaranya akses air bersih, sanitasi yang memadai, serta ruang yang cukup untuk beraktivitas.⁹³ Hunian yang memenuhi standar kesehatan dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental penghuninya, serta mendukung meningkatnya produktivitas mereka dalam konteks sosial dan ekonomi.⁹⁴ Dalam program-program seperti RTLH,

⁹⁰ Ema Hidayati and Suzanna Ratih Sari, "Kualitas Sarana Prasarana Perumahan Griya Harapan Weleri," *LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR* 8, no. 2 (October 17, 2021): 110, <https://doi.org/10.26418/lantang.v8i2.45981>.

⁹¹ Jaka Bangkit Sanjaya et al., "Optimalisasi SDGs Dalam Program RTLH Sebagai Upaya Akselerasi Rehabilitasi Sosial Masyarakat," *Jurnal Bina Desa* 5, no. 1 (February 25, 2023): 15–21, <https://doi.org/10.15294/jbd.v5i1.40920>.

⁹² Indah Pusnita et al., "Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Di Kota Palembang," *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (March 5, 2025): 78–84, <https://doi.org/10.37858/aktivasi.v6i2.541>.

⁹³ Thamrins Thamrins, "No Title," *UIR LAW REVIEW* 1, no. 01 (August 8, 2017): 39, <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.152>.

⁹⁴ Marchelinus Marchelinus and Timmy Setiawan, "Kebutuhan Sistem Modular Pada Bangunan High Density," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4, no. 2 (January 23, 2023): 2315–24, <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i2.22150>.

perbaikan hunian terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Kesehatan, sanitasi, dan akses Pendidikan.⁹⁵ Dengan demikian, perumahan layak menjadi elemen fundamental dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam program OPTIMIS, yang berfokus pada penyediaan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, indikator kesejahteraan yang paling relevan adalah indikator kelayakan hunian. Anggraini dan Kurniawan (2021) menegaskan bahwasanya kondisi fisik hunian mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan di perkotaan.⁹⁶ Munandar et al. (2020) serta Hamdy & Rizkia (2023) menjelaskan bahwasanya kelayakan hunian memengaruhi kesehatan fisik, kenyamanan psikologis, dan stabilitas sosial ekonomi keluarga.⁹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan indikator kelayakan hunian sebagai dasar evaluasi output program OPTIMIS, yang meliputi fungsi dan keamanan bangunan, legalitas kepemilikan, serta ketersediaan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, ventilasi, dan ruang tinggal yang memadai. Rinaldi (2019) menegaskan bahwasanya hunian tidak layak dapat memicu masalah sosial berkelanjutan,

⁹⁵ Muhtadi Muhtadi Muhtadi, "Pemberdayaan Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAZ," *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 7, no. 2 (December 31, 2022): 28, <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>.

⁹⁶ Bintari Laras Anggraini and Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kabupaten Tuban," *Publika*, May 31, 2021, 309–22, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p309-322>.

⁹⁷ Adis Imam Munandar, Aji Wahyu Ramadhani, and Palupi Lindiasari Samputra, "Kemiskinan Anak Di DKI Jakarta: Pendekatan Multiple Overlapping Deprivation Analysis," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 3, no. 3 (February 20, 2020): 306–23, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4125>.

⁹⁸ M. Kholis Hamdy and Hikma Rizkia, "Implementasi Program Rantang Kanyaah Di Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no. 2 (December 29, 2023): 76–89, <https://doi.org/10.15408/empati.v12i2.37035>.

sehingga kelayakan hunian menjadi parameter kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan.⁹⁹

3. Analisis SWOT: Menjelaskan Faktor Pendukung dan Penghambat Program

Analisis SWOT dikenalkan oleh Albert Humphrey, seorang peneliti di Stanford Research Institute pada tahun 1960. Humphrey bersama timnya mengembangkan metode SWOT untuk membantu perusahaan-perusahaan merencanakan strategi organisasi secara lebih sistematis dengan cara mengenali kelemahan dan kelebihan Perusahaan.¹⁰⁰

Inti dari analisis SWOT adalah kemampuan mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal terkait faktor pendukung dan penghambat organisasi agar dapat menyusun strategi yang tepat guna pencapaian program. SWOT sendiri singkatan dari *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, *Threats*. *Strengths* sebagai kekuatan yang berasal dari dalam sebagai pendukung dari program. Hal ini antara lain faktor manusia (SDM), alam (SDA), modal sosial, modal budaya yang dimiliki oleh perusahaan atau masyarakat. *Opportunities* merupakan peluang yang termasuk faktor pendukung yang berasal dari luar. Faktor ini dapat dimanfaatkan agar Masyarakat dapat berkembang, contohnya jaringan dengan pemerintah.¹⁰¹

⁹⁹ Achi Rinaldi, "Model Persamaan Struktural Untuk Menganalisis Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga," *Desimal: Jurnal Matematika* 2, no. 3 (September 30, 2019): 281–88, <https://doi.org/10.24042/djm.v2i3.4692>.

¹⁰⁰ Mujito, *Manajemen Strategik Dengan Pendekatan Analisis SWOT, Wawasan Ilmu*, 2023.

¹⁰¹ Mujito.

Faktor penghambat juga dapat berasal dari dalam atau luar masyarakat. *Weaknesses* merupakan kelemahan atau hal-hal yang menjadi kekurangan atau hambatan internal. Sedangkan *threats* (Ancaman) merupakan faktor luar yang dapat menghambat atau merugikan sebuah program sehingga tidak dapat berjalan dengan baik.¹⁰²

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data umumnya dilaksanakan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi guna mendapat pemahaman yang lebih rinci mengenai fenomena yang diteliti.¹⁰³ Data yang diperoleh dari studi lapangan kemudian disajikan dengan deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang telah dilakukan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasinya yaitu Kampung Blangkon Surakarta. Kampung Blangkon berada di Potrojayan, Kelurahan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Alasan memilih Lokasi ini dikarenakan Lokasi ini merepresentasikan potensi dan tantangan pengentasan kemiskinan yang unik

¹⁰² Mujito.

¹⁰³ Shagufta Bhangu, Fabien Provost, and Carlo Caduff, "Introduction to Qualitative Research Methods – Part I," *Perspectives in Clinical Research* 14, no. 1 (January 2023): 39–42, https://doi.org/10.4103/picr.picr_253_22.

melalui intervensi berupa penyediaan rumah layak huni. Kampung Blangkon dikenal sebagai pusat industri kerajinan blangkon dengan sejarah yang panjang sejak tahun 1970-an. Terdapat 35 perajin yang aktif memproduksi blangkon, termasuk model khas Solo dan daerah lain di Pulau Jawa. Namun, banyak perajin tinggal di permukiman yang tidak layak huni, terutama di lahan ilegal di sekitar Kawasan makam terbengkalai.

Kampung Blangkon dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevansinya dengan tema pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis perumahan. Lokasi ini menawarkan konteks nyata untuk mengkaji dampak penyediaan rumah layak huni terhadap kesejahteraan perajin, baik dari aspek sosial, ekonomi, ataupun budaya. Penelitian ini juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana program relokasi perumahan dapat memberikan solusi bagi permasalahan kemiskinan struktural yang dialami masyarakat setempat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendukung keberlanjutan usaha kerajinan blangkon. Penelitian terfokus dilaksanakan pada Februari dan Juli 2025. Pengumpulan data dilakukan pada 14-16 Februari 2025 dan 24-26 Juli 2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh informasi, fakta, serta keterangan yang dapat dipercaya. Dalam prosesnya, penelitian ini mempergunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yakni

wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Melalui Teknik tersebut, peneliti mampu mendapat data yang sejalan dengan kebutuhan penelitian.¹⁰⁴

a. Observasi:

Observasi sebagai teknik yang memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku dan interaksi dalam konteks alami. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang tidak sepenuhnya dapat digali melalui proses wawancara. Teknik observasi dapat memahami dinamika yang terjadi dalam situasi yang diteliti, sehingga memberikan konteks yang lebih kaya terhadap data yang dikumpulkan.¹⁰⁵

Observasi dilakukan secara langsung di kawasan makam Tinalan, Kampung Blangkon. Pengamatan difokuskan pada kondisi fisik hunian dan lingkungan, aktivitas masyarakat, serta proses dan hasil pembangunan rumah melalui program OPTIMIS. Pada tahap pengamatan, peneliti memperhatikan kondisi bangunan, lingkungan sekitar, akses kawasan, serta kondisi sosial yang dapat diamati secara langsung. Informasi mengenai kondisi sebelum program diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi yang masih dapat diamati, dokumentasi, dan keterangan informan, sedangkan kondisi setelah program diamati melalui keadaan rumah dan lingkungan setelah pembangunan selesai.

¹⁰⁴ Basrowi dan Suwardi, “Memahami Penelitian Kualitatif,” n.d.

¹⁰⁵ Alfi Haris Wanto, “Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City,” *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2, no. 1 (March 26, 2018): 39, <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>.

Hasil observasi nampak dari data-data berupa foto dan deskripsi narasi tentang gambaran Kampung Blangkon. Selain itu hasil observasi nampak dari kondisi kemiskinan dan program yang dijalankan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman informan terkait topik yang diteliti.¹⁰⁶ Dalam temuan ini, peneliti mempergunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan berdasarkan topik dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti mengembangkan pertanyaan tersebut secara lebih mendalam sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Wawancara didokumentasikan menggunakan fitur perekam suara pada telepon seluler setelah memperoleh persetujuan dari informan. Selain rekaman suara, peneliti juga membuat catatan selama dan setelah wawancara untuk mencatat informasi penting yang diperoleh di lapangan. Dalam wawancara menggali seputar kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan sebelum dan sesudah program serta bagaimana pelaksanaan program OPTIMIS dilaksanakan di Kampung Blangkon. Wawancara dilakukan secara langsung di rumah informan yang berada di Kampung Blangkon, Surakarta. Wawancara dilaksanakan pada 14-16 Februari 2025 dan 24-26 Juli 2025 dengan durasi sekitar 60-90 menit pada setiap pertemuan. Hasil data penelitian ini berupa verbatim (kutipan langsung) di beberapa bagian bab III.

¹⁰⁶ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai data, baik dalam bentuk tertulis maupun visual, yang berkaitan dengan penelitian dan berasal dari dokumen lembaga atau pihak lain, bukan dokumen yang dibuat oleh peneliti sendiri. Ini bisa mencakup catatan, laporan, foto, dan video. Dokumentasi berperan dalam memperkuat temuan yang didapatkan peneliti melalui wawancara dan observasi, serta memberikan bukti tambahan yang mendukung analisis.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini data tersebut berupa foto, dokumen program, dan dokumen lain yang berkaitan dengan program baik dari internet atau lapangan.

4. Subjek dan Fokus Penelitian

Agar mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan, penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi berbagai upaya yang dijalankan beserta hasil yang telah diperoleh. Adapun yang dimaksud dengan subjek penelitian ialah para pihak yang menjadi sumber informasi maupun memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁰⁸ Subjek penelitian ini adalah:

- a. Pihak pelaksana program (pemerintah daerah atau pengelola program OPTIMIS)

¹⁰⁷ Rita Rita, "Penerapan Model Learning Start With Question Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Palopo," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 9, no. 4 (November 2, 2020): 451–62, <https://doi.org/10.58230/27454312.59>.

¹⁰⁸ Miles et al., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edit (Arizona: SAGE Publications, 2018).

b. Penerima manfaat (Masyarakat kampung blangkon)

Fokus penelitian atau objek penelitian merupakan isu, permasalahan, maupun fenomena yang menjadi pokok pembahasan dan dikaji dalam penelitian.¹⁰⁹ Adapun fokus dari penelitian ini adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui program OPTIMIS di Kampung Blangkon Surakarta.

5. Penentuan Informan

Informan dipilih sebagaimana teknik *purposive sampling*, yakni metode penentuan narasumber yang dilaksanakan dengan selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan maupun disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti terlebih dahulu menghubungi pihak yang mengetahui pelaksanaan Program OPTIMIS di Kampung Blangkon. Selanjutnya, peneliti memperoleh informasi mengenai masyarakat penerima bantuan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Informan kemudian dipilih berdasarkan pengalaman, pemahaman, serta keterlibatan yang berkaitannya dengan langsung dengan pelaksanaan Program OPTIMIS serta kondisi masyarakat sebelum dan setelah program di Kampung Blangkon Surakarta.

Dari penentuan kriteria di atas, informan yang didapat yakni:

- a. Informan 1 (Ketua POKJA)
- b. Informan 2 (Ketua RW dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah)

¹⁰⁹ Usman Setiady, "Metodologi Penelitian Sosial," *Bumi Aksara*, 2008, [https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi penelitian sosial.pdf](https://difarepositories.uin-suka.ac.id/152/1/metodologi%20penelitian%20sosial.pdf).

- c. Informan 3 (penerima bantuan)
- d. Informan 4 (penerima bantuan)
- e. Informan 5 (penerima bantuan)
- f. Informan 6 (penerima bantuan)
- g. Informan 7 (penerima bantuan)

6. Validitas Data

Salah satu komponen utama dari validitas dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas, yang merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi melalui proses *check and recheck* (memeriksa dan memeriksa ulang), mengingat peneliti tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang menjadi objek kajian, sehingga diperlukan pengecekan data kepada informan lain untuk memastikan keabsahan informasi.¹¹⁰ Keakuratan data ini diuji melalui penerapan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber, proses validasi dilaksanakan dengan mengonfirmasi kesesuaian informasi yang didapat dari beberapa informan penelitian melalui perbandingan maupun penelaahan data dengan mendalam. Selanjutnya, seluruh data yang telah didapatkan dianalisa hingga menghasilkan suatu simpulan, selanjutnya hasil tersebut diklarifikasi kembali pada ketiga sumber data guna mendapat kesepakatan bersama.

¹¹⁰ Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 33 (2020): 145.

Selanjutnya triangulasi Teknik, peneliti mempergunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara maupun dokumentasi guna mendapat data dari sumber yang sama. Dalam prosesnya, peneliti membandingkan dan menyesuaikan hasil pengamatan selama observasi dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara guna memastikan kesesuaian data.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan teknik analisis interaktif yang mencakup empat tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, maupun penarikan simpulan. Penerapan teknik tersebut dilaksanakan setelah seluruh data penelitian terhimpun dengan lengkap. Dalam prosesnya, data yang telah didapat diolah melalui pendekatan kualitatif maupun disajikan dengan deskriptif. Analisis data mempunyai fungsinya sebagai langkah guna mengelompokkan, menafsirkan, serta menyusun data sehingga informasi yang didapat dipahami maupun disajikan dengan sistematis. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memahami fenomena yang dialami oleh para informan, sehingga selanjutnya peneliti dapat menarik Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data sebagai tahapan awal dalam penelitian yang dilakukan melalui proses penghimpunan berbagai data, meliputi hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan pemusatan perhatian, pemilihan, penyederhanaan, transformasi, serta pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tahap ini diawali dengan penyusunan kerangka konseptual, perumusan masalah, dan pengumpulan data penelitian. Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti dapat membuat ringkasan, menentukan tema, memberikan kode, Menyusun memo, dan Langkah lain yang mendukung proses analisis. Reduksi data bertujuan untuk mengarahkan serta menata data agar memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti juga menyeleksi data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinilai valid sesuai kebutuhan penelitian. Beberapa data yang tidak sesuai tidak peneliti tampilkan, namun peneliti simpan sebagai berkas lain-lain, seperti sebagian besar data monografi yang tidak relevan, seperti musim.

c. Penyajian data

Proses penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan informasi hasil penelitian dengan rapi dan berurutan sehingga mudah dimengerti, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Data-data tersebut ada yang berupa foto, kutipan langsung, atau narasi hasil analisis.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai upaya untuk menjawab fokus permasalahan yang diteliti, yang di dalamnya memuat interpretasi peneliti terhadap makna dari data yang telah diperoleh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun guna mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian mengenai strategi pengentasan kemiskinan melalui Program OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera) di Kampung Blangkon Surakarta. Bab I sebagai pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan maupun manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar pijakan penelitian dengan menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan serta arah pembahasan dalam tulisan ini.

Bab II membahas mengenai gambaran umum Program OPTIMIS di Kampung Blangkon Surakarta. Pada bab ini dipaparkan kondisi sosial masyarakat, profil Kampung Blangkon, latar belakang munculnya program, pelaksanaan program, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Pembahasan pada bab ini bertujuan memberikan pemahaman kontekstual mengenai objek penelitian sehingga dapat menjadi landasan dalam menganalisis data penelitian.

Selanjutnya, Bab III berisikan hasil maupun pembahasan yang difokuskan pada jawaban atas rumusan masalah penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui Program OPTIMIS serta hasil atau output program terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Blangkon Surakarta. Data hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan teori dan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam dan sistematis.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, serta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi berbagai pihak maupun penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir skripsi juga dilengkapi dengan daftar pustaka maupun berbagai lampiran sebagai pendukung penelitian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Program OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera) di Kampung Blangkon Surakarta dilaksanakan melalui strategi *pro-poor strategy* dan *basic need approach* melalui penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman, serta pemberian legalitas kepemilikan tanah kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan program dilakukan secara kolaborasi antara pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta. Program OPTIMIS mencerminkan bahwasanya Pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan unsur pemberdayaan masyarakat karena masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan program sehingga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga bagian dari pembangunan. Berdasarkan teori kemiskinan multidimensional, Program OPTIMIS mampu menjawab persoalan kemiskinan yang mencakup tidak hanya aspek penghasilan, tetapi juga keterbatasan dalam memperoleh hunian layak, fasilitas sanitasi, dan rasa aman dalam bermukim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Program OPTIMIS memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Blangkon. Program ini berhasil meningkatkan kualitas hunian masyarakat menjadi lebih layak, sehat, dan aman, sekaligus memberikan kepastian hukum melalui legalitas kepemilikan rumah dan tanah. Selain meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan, program ini juga membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui

penguatan kawasan Kampung Blangkon sebagai sentra kerajinan dan wisata lokal. Dengan demikian, Program OPTIMIS dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan berbasis perumahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sosial maupun ekonomi. Namun demikian karena fokus Program OPTIMIS lebih ke layanan dasar pemukiman maka hal yang paling menonjol dalam program ini adalah peningkatan akses pada layanan tempat tinggal. Dilihat dari akses layanan tempat tinggal program ini sangat berhasil, namun dilihat dari perubahan pendapatan sebagai penopang kesejahteraan hasilnya belum optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya faktor pendukung dan penghambat program ada yang berasal dari luar dan dari dalam. Faktor pendukung utama berasal dari luar, berupa peluang batuan dana. Selain itu juga adanya tokoh Masyarakat yang menjadi jangkar komunikasi pemerintah dan Masyarakat sebagai penerima program. Sedangkan faktor penghambatnya juga ada yang berasal dari dalam dan luar. Hal yang berasal dari luar antara lain partisipasi ekonomi yang sulit, sedangkan pemerintah menuntut adanya partisipasi warga. Selain itu juga terkait legalitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwasanya Analisis SWOT masih mampu digunakan untuk melihat faktor penghambat dan pendukung program pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan secara jangka pendek jelas program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan akses pemukiman hasilnya paling mudah terukur dan sangat terlihat. Oleh karena itu saran bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada fokus kajian yang lebih menekankan pada strategi dan output program yang jangka pendek. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang (*outcome dan impact*) Program OPTIMIS terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat secara lebih luas. Selain itu perlu penelitian di program pengentasan kemiskinan lain dari pemerintah atau LSM, seperti UN Habitat yang juga fokus pada perubahan akses pemukiman untuk pengentasan kemiskinan.
2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Program OPTIMIS perlu terus dikembangkan dan diperluas pelaksanaannya pada kawasan permukiman miskin lainnya yang memiliki kondisi serupa. Selain pembangunan fisik rumah, pemerintah juga perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3. Pemerintah perlu meningkatkan pendampingan pasca program, khususnya dalam pengelolaan lingkungan permukiman, pemeliharaan fasilitas umum, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat agar hasil program dapat bertahan dalam jangka panjang.
4. Bagi Masyarakat Kampung Blangkon, diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas serta hunian yang telah diberikan dengan baik. Selain itu, masyarakat juga perlu terus mengembangkan potensi ekonomi lokal, terutama industri kerajinan blangkon dan wisata kampung, sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- (Disperakim), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. "Inovasi Pelayanan Informasi Publik Di Badan Publik." Jawa Tengah, Indonesia, 2023.
- Agma, Asty Raisha. "Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2025): 25–31. <https://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jisip/article/view/39/34>.
- Alkire, Sabina, and Maria Emma Santos. "Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries." *SSRN Electronic Journal*, 2010. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1815243>.
- Amni, Zarkasyi Rahman, and Novitasari Diyah. "Triple Helix in the Poverty Reduction Policy Based on Community Empowerment in Semarang City." Edited by Hadiyanto, Maryono, and Budi Warsito. *E3S Web of Conferences* 73 (December 21, 2018): 10005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187310005>.
- Anggraini, Bintari Laras, and Badrudin Kurniawan. "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kabupaten Tuban." *Publika*, May 31, 2021, 309–22. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p309-322>.
- Arafat, Brillian Aditya Prawira, and Vicko Taniady. "Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Terhadap Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Di Perkotaan Indonesia: Studi Perbandingan Singapura Dan Australia." *Jurist-Diction* 4, no. 2 (March 5, 2021): 559. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25753>.
- Arndt, Channing, and Kenneth R. Simler. "Estimating Utility-Consistent Poverty Lines with Applications to Egypt and Mozambique." *Economic Development and Cultural Change* 58, no. 3 (April 2010): 449–74. <https://doi.org/10.1086/650413>.
- Aryani, Yuniar Christy, and Ahmad Zuber. "Budaya Kemiskinan Di Kota Surakarta (Studi Etnografi Di Pinggir Rel Palang Joglo, Kadipiro)." *Jurnal Sosiologi DILEMA* Vol.32, no. 2 (2017): 64–79.
- Atika, Firdha Ayu, and Ikaputra Ikaputra. "Permukiman Kumuh Ditinjau Dari Kontinum Formal Dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara)." *Media Komunikasi Geografi* 24, no. 2 (December 19, 2023): 168–88. <https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.65945>.
- Bangkit Sanjaya, Jaka, Mohammad Rizky Surya Pratama, Dian Amaliana, Nabila Fathihatun Dahlya, and Maria Novita Putri Wulandari. "Optimalisasi SDGs Dalam Program RTLH Sebagai Upaya Akselerasi Rehabilitasi Sosial Masyarakat." *Jurnal Bina Desa* 5, no. 1 (February 25, 2023): 15–21. <https://doi.org/10.15294/jbd.v5i1.40920>.
- Bebbington, Anthony. "Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing

- Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty.” *World Development* 27, no. 12 (December 1999): 2021–44. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00104-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00104-7).
- Bukhari, Eri. “Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 2 (May 27, 2021): 219–28. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>.
- Chen, W. William, Jiunn-Jye Sheu, and Chung-Bang Weng. “Assess the Impact of an Online Tobacco Prevention Training Program on Teachers and Their Students.” *Journal of Drug Education* 43, no. 2 (June 9, 2013): 141–53. <https://doi.org/10.2190/DE.43.2.c>.
- Christiaensen, Luc, Lionel Demery, and Jesper Kuhl. “The (Evolving) Role of Agriculture in Poverty Reduction—An Empirical Perspective.” *Journal of Development Economics* 96, no. 2 (November 2011): 239–54. <https://doi.org/10.1016/j.jdevec.2010.10.006>.
- DIniyanto, A. “Peraturan Daerah Dana Cadangan: Strategi Alternatif Pembangunan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 478–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>.
- Ernawati, Ernawati, Tajuddin Tajuddin, and Syamsir Nur. “Does Government Expenditure Affect Regional Inclusive Growth? An Experience of Implementing Village Fund Policy in Indonesia.” *Economies* 9, no. 4 (November 2, 2021): 164. <https://doi.org/10.3390/economies9040164>.
- Fadhilah, Fadhilah, and Bakti Setiawan. “Pengaruh Program KOTAKU Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Selumit Pantai.” *TATALOKA* 24, no. 2 (May 31, 2022): 84–100. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.2.84-100>.
- Febrina, Rizki Dwi, and Djoko Suwandono. “Evaluasi Rumah Susun Klender Berdasarkan Kriteria Layak Huni.” *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 11, no. 2 (June 2, 2022): 76–84. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2022.28835>.
- Ferdiansyah, Indra, Baenil Huda, Agustia Hananto, and Tukino Tukino. “Analisis Clustering Menggunakan Metode K-Means Pada Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2020.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 5, 2024): 858–69. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10360>.
- Fitrianti, Nur Aini, and Nurul Laili Fadhilah. “Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung Di Provinsi Jakarta.” *Lentera Hukum* 5, no. 2 (July 31, 2018): 277. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.6788>.
- Ghosh, Ranajit, and Prolay Mondal. “Unveiling the Complex Facets of Poverty: Unidimensional and Multidimensional Insights from Rural Areas of Suri Sadar Sub-Division, Birbhum District, Eastern India.” *Societies* 14, no. 4 (April 17, 2024): 54. <https://doi.org/10.3390/soc14040054>.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif.” *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic*

- Traveling and Creative Economy* 1, no. 2 (October 21, 2021): 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.
- Haldane, Victoria, Fiona L. H. Chuah, Aastha Srivastava, Shweta R. Singh, Gerald C. H. Koh, Chia Kee Seng, and Helena Legido-Quigley. “Community Participation in Health Services Development, Implementation, and Evaluation: A Systematic Review of Empowerment, Health, Community, and Process Outcomes.” Edited by Cathy Maulsby. *PLOS ONE* 14, no. 5 (May 10, 2019): e0216112. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216112>.
- Hamdy, M. Kholis, and Hikma Rizkia. “Implementasi Program Rantang Kanyaah Di Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no. 2 (December 29, 2023): 76–89. <https://doi.org/10.15408/empati.v12i2.37035>.
- Hariyatie, N. “Kerjasama Kawasan Perbatasan Dan Pembangunan Daerah Kalimantan (Border Regional Cooperation and Regional Development in Kalimantan).” *Proyeksi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 20, no. 2 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/proyeksi.v20i02.906>.
- Harjanta, SL. “Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kulon Progo, Realisasi Janji Kampanye Bupati Hasto Wardoyo Di Tahun Pertama Pemerintahan Periode Ke Dua.” *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)* 2, no. 1 (April 8, 2020): 38–48. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v2i1.685>.
- Hasba, Sandra, and Syahrul Syahrul. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan : Kasus Kelurahan Bungguosu, Konawe.” *Shautut Tarbiyah* 24, no. 1 (October 4, 2018): 127. <https://doi.org/10.31332/str.v24i1.924>.
- Hermanto. “Profil Kelurahan Serengan Tahun 2024.” Kelurahan Serengan, 2024. <https://kel-serengan.surakarta.go.id/>.
- Hidayati, Ema, and Suzanna Ratih Sari. “Kualitas Sarana Prasarana Perumahan Griya Harapan Weleri.” *LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR* 8, no. 2 (October 17, 2021): 110. <https://doi.org/10.26418/lantang.v8i2.45981>.
- Humas Jateng. “Dalam 3 Tahun Terakhir, Realisasi Program Tuku Lemah Oleh Omah Di Jateng Capai 1.790 Unit Rumah,” 2024. [https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=8935#:~:text=SEMARANG – Sejak tahun 2020 sampai 2023%2C,\(Disperakim\) Jateng%2C Arief Djatmiko mengatakan%2C program bantuan.](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=8935#:~:text=SEMARANG – Sejak tahun 2020 sampai 2023%2C,(Disperakim) Jateng%2C Arief Djatmiko mengatakan%2C program bantuan.)
- Indonesia, Republik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pub. L. No. Peraturan Presiden No. 15/2010 (2010). <https://bphn.go.id/data/documents/10pr015.pdf>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. LN 2009 No. 12, Pemerintah Republik Indonesia (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun->

2009.

- Iqbal, Muhammad, Edi Basuno, and Gelar Satya Budhi. "Esensi Dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 25, no. 2 (August 12, 2016): 73. <https://doi.org/10.21082/fae.v25n2.2007.73-88>.
- Ismail, Topik, Septiana Dwiputranti, and Nita Nurliawati. "Faktor Kesejahteraan Objektif Dalam Subjektifitas Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Media Administrasi Terapan* 3, no. 2 (June 27, 2023): 158–67. <https://doi.org/10.31113/jmat.v3i2.63>.
- Kakwani, Nanak, and Hyun H. Son. "Pro-Poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies (Distinguished Lecture)." *The Pakistan Development Review*, December 1, 2003, 417–44. <https://doi.org/10.30541/v42i4Ipp.417-444>.
- Kemendikbud.go.id. "Pengertian Strategi," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>.
- Khuzaimah, Umami, Yayuk Farida Baliwati, and Ikeu Tanzihah. "Peranan Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penanganan Gizi Kurang Di Provinsi Jawa Barat (The Role Of Pillar Sustainable Development Goals Relate to Tackling Undernutrition in West Java Province)." *Amerta Nutrition* 5, no. 3 (September 1, 2021): 196. <https://doi.org/10.20473/amnt.v5i3.2021.196-210>.
- Kleemeier, L. "Policy Reform and Rural Development Assistance in Tanzania." *Public Administration and Development* 9, no. 4 (September 19, 1989): 405–16. <https://doi.org/10.1002/pad.4230090407>.
- Kuhl, Jesper, Luc Christiaensen, and Lionel Demery. *The Role Of Agriculture In Poverty Reduction An Empirical Perspective*. World Bank, Washington, DC, 2006. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4013>.
- Larasati Chairani, Annisa. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Palembang." *Iapa Proceedings Conference*, October 31, 2024, 325. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1062>.
- Laterveer, L. "Pro-Poor Health Policies in Poverty Reduction Strategies." *Health Policy and Planning* 18, no. 2 (June 1, 2003): 138–45. <https://doi.org/10.1093/heapol/czg018>.
- Manning, Richard. "Pro-Poor Growth: Negotiating Consensus on a Contentious Issue." *Development* 50, no. 2 (June 21, 2007): 42–47. <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1100357>.
- Mansyur, Jusmianty, Imam Suyitno, and Muhammad Akbal. "Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Phinisi Integration Review* 5, no. 1 (February 28, 2022): 182. <https://doi.org/10.26858/pir.v5i1.31727>.

- Marchelinus, Marchelinus, and Timmy Setiawan. "Kebutuhan Sistem Modular Pada Bangunan High Density." *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4, no. 2 (January 23, 2023): 2315–24. <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i2.22150>.
- McAndrew, Rose, and Vicki Kaskutas. "Use of a Logic Model to Develop an Innovative Hand Therapy Clinic to Provide Experiential Learning for Occupational Therapy Students." *Journal of Occupational Therapy Education* 4, no. 3 (January 1, 2020). <https://doi.org/10.26681/jote.2020.040316>.
- Meidiana, Ni Putu Cahya Agung Tika, and A.A.I.N. Marhaeni. "Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur, Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin." *Buletin Studi Ekonomi*, July 30, 2019, 54. <https://doi.org/10.24843/BSE.2019.v24.i01.p04>.
- Modiash, Alfina, and Nany Yuliasuti. "Pengembangan Kampung Tematik Berkelanjutan Pada Kampung Blangkon Potrojayan Serengan Kota Surakarta." *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 21, no. 1 (March 31, 2025): 51–67. <https://doi.org/10.14710/pwk.v21i1.58801>.
- Muhtadi, Muhtadi Muhtadi. "Pemberdayaan Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAZ." *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 7, no. 2 (December 31, 2022): 28. <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i2.16989>.
- Mujito. *Manajemen Strategik Dengan Pendekatan Analisis SWOT*. Wawasan Ilmu, 2023.
- Munandar, Adis Imam, Aji Wahyu Ramadhani, and Palupi Lindiasari Samputra. "Kemiskinan Anak Di DKI Jakarta: Pendekatan Multiple Overlapping Deprivation Analysis." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 3, no. 3 (February 20, 2020): 306–23. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4125>.
- Novianto, Setyo, and Heri Sudarsono. "Analysis of Poverty Level in Districts/Cities of Central Java." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16, no. 1 (July 1, 2018): 1. <https://doi.org/10.22219/jep.v16i1.8181>.
- Nuarida, Nuarida. "Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat)." *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* 2, no. 2 (December 5, 2021): 111–19. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.55>.
- Nuraini, Febritesna, Eka Kurnia Firmansyah, Derri Agusta Putra, Bakhtiar Tijjang, and Trinandari Prasetyo Nugrahanti. "Coping Strategy Keluarga Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Selama Bulan Ramadhan." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (April 14, 2023): 13–25. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.25165>.

- Nurulita, Fifi, K Kamaruddin, and A Asmini. "Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 11, no. 2 (August 29, 2023): 261–72. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i2.1314>.
- Nyoman Doddy Darmawan, I Nyoman Suprpta. "Strategi Bappeda Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Buleleng." *Locus* 12, no. 2 (2020): 30–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/locus.v12i2.602>.
- Permatasari, Vinanda Sonya, and Lia Yuliana. "Penerapan Regresi Logistik Biner Pada Status Kesejahteraan Rumah Tangga Di Provinsi Bali Tahun 2020." *Seminar Nasional Official Statistics* 2021, no. 1 (November 1, 2021): 497–506. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.943>.
- Pratama, Febri Fajar, and Deni Chandra. "Dampak Strategis Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan Pada Masa Pandemi COVID-19 Melalui Program PKH Di Kota Tasikmalaya." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 1 (June 1, 2022): 63–76. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41238>.
- Pusnita, Indah, Wagisri Wagisri, Julia Tessa, Eka Nurwahyuliningsih, and Inne Miftah Dewi. "Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Di Kota Palembang." *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (March 5, 2025): 78–84. <https://doi.org/10.37858/aktivasi.v6i2.541>.
- Putri, Anindya Mitra Raisnur, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, and Abdul Ghafar Ismail. "A Systematic Review on Multidimensional Poverty Measurement." *Journal of Ecohumanism* 3, no. 8 (December 3, 2024). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5041>.
- Qin, Xiaonan, Yue Wang, Lina Liu, Wenhua Yuan, and Jianchun Li. "Research on the Development Potential of China's Pro-Poor Tourism Industry Based on Geographical Nature Evaluation." *Sustainability* 14, no. 22 (November 14, 2022): 15069. <https://doi.org/10.3390/su142215069>.
- Ramadhaniar, Faqiha Putri, and Evi Satispi. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Permodalan Nasional Madani Melalui Program Ruang Pintar." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 3 (September 27, 2022): 154–66. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i3.644>.
- Reavindo, Quarthano. "Pengaruh IPM Dan Laju Pertumbuhan PDRB Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Karo Tahun 2011-2019." *Syntax Idea* 3, no. 4 (April 20, 2021): 903–15. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i4.1121>.
- Rinaldi, Achi. "Model Persamaan Struktural Untuk Menganalisis Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga." *Desimal: Jurnal Matematika* 2, no. 3 (September 30, 2019): 281–88. <https://doi.org/10.24042/djm.v2i3.4692>.
- Rondinelli, Dennis A. "Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical

- Response.” *Development and Change* 21, no. 3 (July 22, 1990): 491–500. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1990.tb00385.x>.
- Rosyada, Nisrina Dhiya, Ana Hardiana, and Paramita Rahayu. “Faktor Prioritas Dalam Pola Penanganan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai (Studi Kasus: Kali Pepe, Kota Surakarta).” *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 16, no. 1 (January 28, 2021): 45. <https://doi.org/10.20961/region.v16i1.24904>.
- Sabilillah, Jihan, and Mulyo Hendarto Robertus. “Pengaruh Urbanisasi, Modal Manusia, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Perkotaan Di Enam Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2021.” *Diponegoro Journal of Economics* 13, no. 3 (September 30, 2024): 43–53. <https://doi.org/10.14710/djoe.45373>.
- Sabiq, Ahmad, Adhi Iman Sulaiman, and Toto Sugito. “Family Empowerment Program as Community Education in Supporting the Prevention of the Covid-19 Pandemic.” *International Educational Research* 3, no. 3 (September 19, 2020): p22. <https://doi.org/10.30560/ier.v3n3p22>.
- Salim, Agus, Siti Nursanti Irriani, and Yunita Rahmi Hapsari. “Implementasi Pendekatan Symbio-City Pada Pembangunan Inklusif: Studi Kasus Slums Upgrading Di Kota Yogyakarta.” *Bappenas Working Papers* 5, no. 2 (July 31, 2022): 241–69. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.114>.
- Saputra, Bagus Eka. “Pengaruh Kemahalan Konstruksi, Keparahan Kemiskinan, Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap PDRB Konstruksi Di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta.” *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 21, no. 2 (April 4, 2024): 193–204. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v21i2.1067>.
- Saputra, Jevi. “Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah Di Kota Jambi.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 2 (December 11, 2022): 241–49. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1524>.
- Sari, Agistya Risna Sari, and Mohammad Agung Ridlo. “Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan.” *Jurnal Kajian Ruang* 1, no. 2 (January 20, 2022): 160. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>.
- Sari, Delfia Tanjung, and Muhammad Dani Susetiawan. “Socioeconomic Determinants of Health Status; Evidence from Nusa Tenggara Barat – Indonesia.” *Jurnal Manajemen Strategik Dan Simulasi Bisnis* 6, no. 1 (August 12, 2025): 72–88. <https://doi.org/10.25077/mssb.6.1.72-88.2025>.
- Sholihah, K. A., Ratih, I. I. K., Rahmawati, A. F., Mutmainah, L. A., & Purwanta, H. “Development of the Blangkon Industry in Potrojayan Village 1995–2019.” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* Vol. 8, No (2024): 12671–12680. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4099>.
- Sihombing, Lani Anggraeni, and Citra Fadhillah Utami. “Hirarki Dan Distribusi

- Kota: Penyebaran, Dan Kepadatan Penduduk Serta Implikasinya Terhadap Infrastruktur.” *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 5, no. 2 (July 11, 2023): 218–29. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.159>.
- Sri Issundari, Yanyan Mochamad Yani. “Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kerja Sama Internasional Daerah.” *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366>.
- Suhendra, Adi. “Social Innovation of Livablehome as a City Government Policy in Social Development in Prabumulih City.” *International Journal of Regional Innovation* 2, no. 2 (May 31, 2022): 36–41. <https://doi.org/10.52000/ijori.v2i2.50>.
- Tando, Cahyoko Edi, Sudarmo, and Rina Herlina Haryanti. “Collaborative Governance in Overcoming Poverty Problems in Surakarta: A Literature Review.” In *Proceedings of the Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019)*. Paris, France: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/icstcsd-19.2020.11>.
- Telaumbanua, Fetriaman, and Ayler Beniah Ndraha. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Ekologi Manajemen Di Kabupaten Nias.” *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 10, no. 2 (August 30, 2023): 1631–44. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.51798>.
- Thamrins, Thamrins. “No Title.” *UIR LAW REVIEW* 1, no. 01 (August 8, 2017): 39. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.152>.
- Torghele, Karen, Arielle Buyum, Nicole Dubruiel, Jill Augustine, Catherine Houlihan, Melissa Alperin, and Kathleen R. Miner. “Logic Model Use in Developing a Survey Instrument for Program Evaluation: Emergency Preparedness Summits for Schools of Nursing in Georgia.” *Public Health Nursing* 24, no. 5 (September 14, 2007): 472–79. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1446.2007.00658.x>.
- Uvhagen, Håkan, Henna Hasson, Johan Hansson, and Mia von Knorring. “What Happened and Why? A Programme Theory-Based Qualitative Evaluation of a Healthcare-Academia Partnership Reform in Primary Care.” *BMC Health Services Research* 19, no. 1 (December 1, 2019): 785. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4665-1>.
- Wawancara dengan Pak Iwan. “Mata Pencarian Warga Kawasan Makam Tinalan, Kampung Blangkon,” n.d.
- Widiyanti, Imas, Ahmad Baili, and Shibghotullah Mujadidi. “Implementasi Program KOTAKU Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di Kricak Yogyakarta.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 1 (July 28, 2021): 37–54. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i1.7968>.

Yamin, Sofyan, and Teguh Dartanto. "Pengentasan Orang Miskin Di Indonesia: Peran Modal Sosial Yang Terlupakan." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 17, no. 1 (July 1, 2016): 88–102. <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i1.656>.

Zulkarnaini, Wilko Rahmad, Elfindri Elfindri, and Delfia Tanjung Sari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi." *Jurnal Planologi* 16, no. 2 (October 9, 2019): 169. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047>.

